

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI BERBASIS PERTANIAN
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
NUSA TENGGARA BARAT**

***THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL-BASED
INDUSTRIALIZATION POLICY AND ITS IMPACT ON COMMUNITY WELFARE
IN WEST NUSA TENGGARA PROVINCE***



Nomor Induk Mahasiswa : 105031100421

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI BERBASIS PERTANIAN
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
NUSA TENGGARA BARAT**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi

Magister Ilmu Administrasi Publik

Kekhususan : Kebijakan Publik

Di susun dan di ajukan oleh :

M ARIF BUDIMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 105031100421

Kepada

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2025

TESIS
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI BERBASIS PERTANIAN
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
NUSA TENGGARA BARAT**

Yang Di susun dan di ajukan oleh :

M ARIF BUDIMAN

Nomor Induk Mahasiswa : 105 03 11 004 21

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian Tesis
pada tanggal 30 september 2023

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.Abdul Mahsyar M.Si.



Prof.Dr.Lukman Hakim M.Si.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Unismuh Makassar.

Ketua program Studi
Magister Administrasi Publik



Prof.Dr.H.Irwan Akib M.Pd
NBM.613 949



Dr.Hj.Fatmawati M.Si
NBM.1076 424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

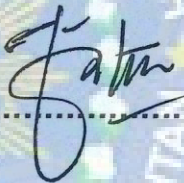
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Industrialisasi Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
Nama Mahasiswa : M arif Budiman
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : kebijakan publik.

Telah di uji dan dipertahankan di depan panitia penguji tesis pada tanggal 5 september 2023,pukul 13:30-15:00 Wita,di ruang Ujian pascasarjana dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dapat di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister ilmu administrasi public (M.A.P) pada program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

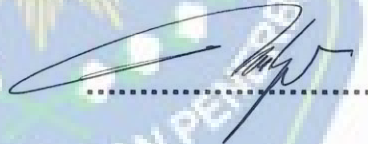
Makassar 5 september 2023.

Tim Penguji :

Dr.Hj.Fatmawati, M.Si.
(ketua sidang)


.....

Dr.Abdul Mahsyar, M.Si
(pembimbing I)


.....

Prof.dr.H.Lukman Hakim,M.Si
(pembimbing II)


.....

Dr.Hj.Ihyani Malik,M.Si
(penguji)


.....

Dr.Jaelani Usman, M.Si
(penguji)


.....

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang Bertanda Tangan Di bawah ini :

Nama : M Arif Budiman

NIM : 105 03 11 004 21

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 September 2025.

Yang Menyatakan,



M Arif Budiman.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, yang melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat”** Tidak lupa penulis kirimkan salawat serta salam kepada rasulullah salallahu alaihi wassalam, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis beberapa kali mengalami hambatan dan tantangan tetapi tidak menjadikan penulis patah semangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa keikhlasan, usaha, serta doa dalam pemanduan proses penyelesaian tesis ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam dan penghargaan yang setingginya, serta salam penuh hormat dengan segenap cinta dan keabadian kepada kedua orang tua penulis Ayahanda H. Abdul Wahab Ibrahim dan ibunda HJ. Siti Jubaidah, yang telah merawat, mendidik dan menuntun serta senantiasa memberikan nasehat, dukungan, harapan, kasih sayang, doa yang tulus tanpa pamrih dan pengorbanan yang tak terhingga. Kepada saudaraku dan sahabat semuanya yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu disini yang senantiasa mendukung penuh secara moril dan materil sehingga sangat membantu kelancaran penulis dalam menyelesaikan tesis ini.



M Arif Budiman.

ABSTRACT

Industrialization has long been regarded as a key driver of economic transformation in developing countries, including Indonesia, where agriculture remains the backbone of many regional economies. In West Nusa Tenggara (NTB) Province, the challenge of enhancing community welfare requires innovative policy strategies, one of which is agricultural-based industrialization. This study aims to analyze the influence of the implementation of agricultural-based industrialization policy on community welfare in NTB Province. The research focuses on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure as key determinants of policy implementation success, based on Edward III's theory (Edward III, 1980; Agustino, 2012; Anderson, 2014). A quantitative approach was employed using a survey method involving 69 respondents. Data analysis included validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression, as well as t-tests and F-tests. The results indicate that all four variables have a positive and significant effect on policy implementation. The coefficient of determination (R^2) of 0.740 suggests that 74% of the variance in policy implementation can be explained by the independent variables. These findings imply that effective policy planning and execution, supported by clear communication, adequate resources, competent implementers, and a well-structured bureaucracy, significantly contribute to improving community welfare in the NTB region.

Keywords: policy, industrialization, agriculture, welfare, NTB

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Fokus penelitian ini adalah pada variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan teori Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei kepada 69 responden. Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, serta uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan. Koefisien determinasi sebesar 0,740 menunjukkan bahwa 74% variasi implementasi kebijakan dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang baik melalui dukungan komunikasi, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana yang baik, serta struktur birokrasi yang jelas sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah NTB.

Kata kunci: kebijakan, industrialisasi, pertanian, kesejahteraan, NTB



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A.Latar Belakang..... | 1 |
| B.Rumusan Masalah..... | 11 |
| C.Fokus Penelitian..... | 11 |
| D.Tujuan Penelitian..... | 12 |
| E.Manfaat Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13 |
| A.Tinjauan Penelitian yang relevan..... | 13 |
| B.Teori dan Konsep..... | 18 |
| 1.Teori implementasi..... | 20 |
| 2.dimensi dan konsep kebijakan publik..... | 22 |
| 3.konsep industrialissi..... | 26 |
| 4.Industrialisasi berbasis pertanian..... | 29 |
| 5.konsep kesejahteraan..... | 30 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 35 |
| 1.Pendekatan Penelitian..... | 35 |
| 2.Lokasi dan Waktu penelitian..... | 36 |
| 3.Data dan Sumber Data..... | 36 |
| 4.Tehnik pengumpulan data..... | 37 |
| 5.Tehnik Analisis Data..... | 42 |
| 6.Pengecekan Keabsahan Data..... | 52 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 56 |
| A. Deskripsi objek penelitian..... | 56 |
| 1.Luas dan batas wilayah administrasi..... | 56 |
| 2.letak dan kondisi geografis | 56 |
| 3.Topografi..... | 57 |
| 4.geologi..... | 58 |
| 5.Potensi pengembangan wilayah..... | 59 |
| 6.Demografi..... | 61 |
| 7.Struktur dan komposisi penduduk..... | 63 |
| 8.Fokus kesejahteraan sosial..... | 64 |
| B.Hasil penelitian..... | 66 |
| a.Hasil Uji asumsi Klasik..... | 66 |
| 2.Uji Reabilitas..... | 68 |
| 3.Hasil uji normalitas..... | 68 |
| 4.Hasil Uji Heteroskedastisitas..... | 69 |
| 5.Hasil Uji Multikoleniaritas..... | 70 |
| 6.Uji parsial (Uji T) | 71 |
| 7.Uji Simultan (Uji F)..... | 73 |

| | |
|--|----|
| 8. Analisis Regresi linear berganda..... | 74 |
| 9. Koefisien determinasi..... | 75 |
| b. Hasil pengujian hipotesis..... | 76 |
| 1. variabel komunikasi (x1)..... | 76 |
| 2. variabel sumber daya (x2)..... | 76 |
| 3. variabel disposisi (x3)..... | 77 |
| 4. variabel struktur birokrasi (x4)..... | 77 |
| BAB V PENUTUP..... | 82 |
| A. Kesimpulan..... | 82 |
| B. Saran..... | 86 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 90 |
| LAMPIRAN..... | 94 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut Fajariah & Suryo (2020); Proses Industrialisasi pertama kali terjadi di Inggris, ditandai dengan transformasi 'Zaman Kegelapan' dari feodalisme, melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses produksi ekonomi. Dijelaskan oleh Adryamarthanino (2021); Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor seperti: 1) Situasi politik yang stabil; 2) bahan tambang (batu bara, biji besi, timah, dan kaolin); 3) penemuan baru di bidang teknologi; 4) perlindungan hukum bagi temuan baru (hak paten) sehingga mendorong kegiatan penelitian ilmiah; 5) Arus urbanisasi yang besar akibat Revolusi Agraria di pedesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak.

Selaras dengan itu Trisyanti & Prasetyo (2018); dalam *revolusi industry dan tantangan revolusi 4.0*, juga mengatakan kemampuan inggris menerapkan sistem pabrik modern pada tekstil, dengan menerapkan inovasi yang meningkatkan produksi melalui mekanisasi, menjadi stimulus bagi perkembangan teknologi selanjutnya, secara bertahap penggunaannya juga diterapkan pada industri bidang yang lain.

Di Indonesia Konsep Industrialisasi marak di perbincangkan pasca Orde Baru, karna sebetulnya proses industrialisasi baru berjalan sejak pembangunan ekonomi dimulai secara terencana pada tahun 1969, mendukung hal tersebut ada banyak peraturan pemerintah yang dibuat untuk terselenggaranya proses industrialisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Amira (2019) terkait Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri, juga oleh Muryati et al (2016); soal Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan, serta Muryati et al (2016); terkait Undang-Undang No. 8 tahun 1971, tentang minyak dan gas, sampai pada lahirnya Undang-Undang tentang industrialisasi (Undang-Undang No.5 1984).

keberadaan peraturan perundang-undangan selain sebagai legitimasi pelaksanaan juga sebagai salah satu ciri keseriusan pemerintah dalam implementasi kebijakan industrialisasi yang dipercaya sebagai stimulus pembangunan nasional, hampir segala sektor mengalami reformasi dibidangnya, bahkan menurut Damayanthi (2008); industri menjadi kata kunci dalam paradigma pembangunan tersebut, menyambung hal itu Sholihah et al. (2017); Dalam proses pembangunan, Sektor industri dijadikan sebagai prioritas yang diharapkan mempunyai peranan sebagai leading sector atau sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor lainnya seperti pertanian dan lain-lain. Menurut Imamudin (2018); pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dimulai dari investasi di sektor industri, dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor modern akan menimbulkan perluasan output pada sektor

modern Pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Hendrastomo (2011); Pertumbuhan pesat sektor industri sedikit banyak telah mengubah paradigma masyarakat dan negara dari agraris ke sektor industri dan jasa. Ini terjadi karena mempromosikan *modernitas, hidup sejahtera, jam kerja yang teratur dengan penghasilan tetap*, telah memunculkan perubahan radikal dalam tatanan sosial ekonomi kita. menyambung hal tersebut Wahyu Askar (2015); menegaskan Sektor pertanian yang notabene menjadi basis perekonomian kita, sedikit demi sedikit diganti dengan industrialisasi. namun seiring dengan perkembangan paradigma, mengalami pembaharuan dan perkembangan seperti yang dijelaskan oleh Simatupang & Syafa'at (2016) bahwa tidak ada dikotomi antara pertanian maupun ekonomi atau sektor yang lain, sebab semua sektor bisa saling interkoneksi, hybrid, bahkan terbuka pada multi collaborative, seperti industrialisasi berbasis pertanian dipahami sebagai grand strategi untuk pembangunan di level regional maupun nasional, juga Heryani, et al (2020); mengatakan selain menawarkan industrialisasi juga membuka ruang untuk inovasi dan melakukan pengembangan.

Dampak perkembangan revolusi industri secara langsung akan berpengaruh terhadap sektor pertanian di Indonesia. Revolusi industri yang berkembang semakin cepat menuntut adanya adaptasi di semua sektor lainnya, termasuk pertanian. menurut Wardhiani, (2019); Revolusi Industri 4.0 yang sedang berkembang saat ini sudah tidak lagi membicarakan otomatisasi alat,

tetapi lebih pada sistem siber fisik atau Internet of Things. Sektor pertanian Indonesia harus siap menghadapi Industri 4.0 saat ini. Mekanisasi alat dan mesin pertanian tidak hanya harus bisa berjalan secara otomatis, tetapi juga terintegrasi dengan jaringan internet. Sistem mekanisasi tersebut akan berperan penting dalam mencapai target swasembada pangan yang berkelanjutan.

Kementerian Pertanian melalui Badan Litbang Pertanian mulai berinovasi dengan mengembangkan teknologi-teknologi cloud computing, mobile internet, dan artificial intelligence yang kemudian akan digabung menjadi teknologi alat mesin pertanian yang lebih modern, misalnya berupa traktor yang mampu beroperasi tanpa operator, pesawat drone untuk deteksi unsur hara, dan robot grafting. Semua teknologi yang dihasilkan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas usahatani.

dalam perkembangan ilmu pengetahuan sudah menjadi trend penelitian dalam 10 tahun terakhir banyak ilmuan yang memfokuskan pada penelitian di sektor pertumbuhan pertanian, kita bisa menggunakan scopus sebagai sumber data, dan mengetik *kata kunci* "agricultural growth" lalu pilih 10 tahun terakhir, ada 47,367 ribu dokumen penelitian yang muncul, dengan diagram sebagai berikut:

Documents by year

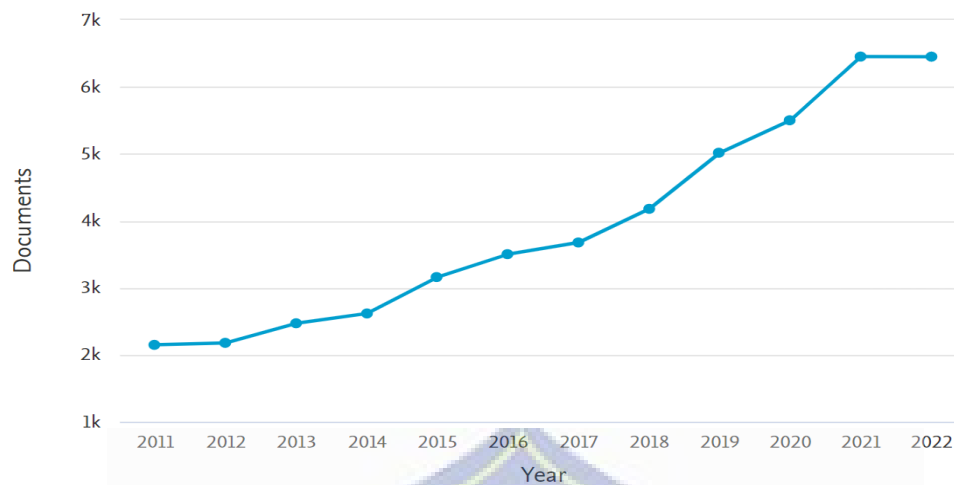


Diagram di atas mendeskripsikan sejak 2011 hingga 2022 trend penelitian terkait pertumbuhan disektor pertanian mengalami perkembangan, ini menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk inovasi kebijakan disektor industri berbasis pertanian hingga pada level implementasi, menurut Gunawan & Winarno (2017); dalam penelitiannya terkait *kebijakan yang berbasis riset*, merupakan aspek penting yang telah dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi proses pembuatan kebijakan, tidak terkecuali kebijakan negara maju, lembaga non pemerintah, lembaga usaha, dan lembaga nirlaba. Menyambung dengan itu Kharisma (2018); bahwa Dengan harapan Sebuah kebijakan akan berhasil bukan hanya pada pencapaian target program, tapi juga mampu mempengaruhi pola hidup dan kultur masyarakat.

Mengimbangi kemajuan dan perkembangan pengetahuan tersebut, pemerintah Nusa Tenggara Barat memiliki kebijakan terkait industrialisasi di sektor pertanian, sebuah upaya meningkatkan produktivitas petani, menurut Matina & Praza (2018); Sektor pertanian di anggap sebagai hal yang paling primer dan strategis dalam perekonomian tingkat regional maupun nasional disebabkan

sektor ini menjadi sumber utama kehidupan dan pendapatan masyarakat tani, penyedia kebutuhan pangan rakyat, penghasil bahan mentah dan bahan baku industri pengolahan, penyedia lapangan kerja, dan lapangan usaha, sumber penghasil devisa negara, dan salah satu unsur pelestarian lingkungan hidup, serta sebagai usaha yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal serupa dijelaskan oleh Matina & Praza, (2018); Hal ini membuat Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program Sustainable Development Goals (SDG's). selain itu program ini telah menjadi local genius, serta menjadi ciri, dan tanda, tata kelola pemerintahan yang adaptif dan inovatif, dalam merumuskan program sebagai sebuah strategi pembangunan daerah.

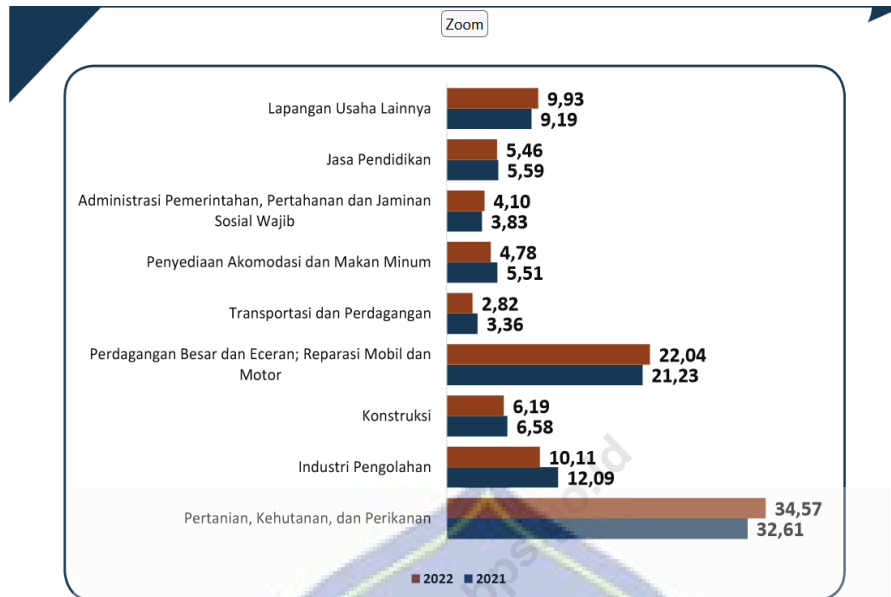
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat tahun 2021 luas wilayah pertanian di provinsi tersebut sebesar 276,21 ribu hektar atau mengalami peningkatan sebanyak 2,75 ribu hektar (1,01 persen) dibandingkan tahun 2020. (Paramita C & Puja Hapsari 2021). dengan luas tersebut menjadi potensi pembangunan yang berkelanjutan dalam menciptakan kesejahteraan dan meminimalisir angka kemiskinan di Provinsi tersebut, selain itu kemajuan di Sektor ekonomi dengan kontribusi terbesar pada tahun 2020 adalah sektor pertanian, dan kehutanan dengan kontribusi 23,19 persen. Sektor pertambangan dan penggalan berada pada urutan kedua dengan kontribusi 17,37 persen. Di urutan ketiga adalah sektor perdagangan dengan kontribusi 14,20 persen. Sementara Kontribusi sektor industri pengolahan baru mencapai 4,03 persen pada tahun 2020, hal ini menjadi perhatian khusus untuk dimaksimalkan

sebagai sumber daya menciptakan kesejahteraan dan meminimalisir angka kemiskinan,

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa kebijakan pembangunan nasional yang berpihak kepada fakir miskin harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Hal ini mengandung pengertian bahwa fakir miskin diatur oleh negara dalam tatanan hukum yang sistematis (Murwadi, 2018). Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia, sekarang ini menghadapi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan adalah amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Merespon hal tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencoba untuk memprioritaskan sektor industri pengolahan dalam pembangunan ekonomi. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023, tertera misi kelima dalam pembangunan daerah 2019-2023 yaitu Sejahtera dan Mandiri melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata, dan industrialisasi.

berdasarkan data (BPS) resmi Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Budiana, I-N & Damayanti, A. (2022) mengkonfirmasi bahwa angka usia produktif banyak yang berusaha pada sektor pertanian, hal ini bisa dilihat pada diagram sebagai berikut:



Gambar 26. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Provinsi NTB Menurut Lapangan Usaha Kondisi Agustus, 2021-2022 (persen)

Berdasarkan diagram di atas, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mampu menyerap tenaga kerja hingga sebanyak 34,57 persen, ini bertumpu sangat berat pada dua lapangan usaha, yaitu lapangan usaha Pertanian dan Perdagangan. Hanya dari dua lapangan usaha tersebut, serapan pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencapai hampir 56 persen. Itu berarti separuh penduduk yang bekerja di Provinsi tersebut pada tahun 2022 bekerja pada lapangan usaha Tersebut, dengan melihat potensi disektor pertanian harus dapat dimaksimalkan bukan saja pada level formulasi kebijakan, atau program tapi juga pada tingkat implementasi dan evaluasi kebijakan, karna paradigma pembangunannya menggunakan industrialisasi sebagai sektor utama, dan terintegrasi oleh sektor pertanian yang besar, pariwisata, dan jasa, sebagai 3 sektor penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB), yang seharusnya

sudah cukup sebagai syarat menjadi salah satu daerah yang maju, paling tidak dalam melawan kemiskinan untuk kesejahteraan masyarakat.

Data termuktahir mengenai penduduk miskin di Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik nasional pada periode Maret-September 2021. Dalam rilisan tersebut, provinsi Nusa Tenggara Barat masuk pada 10 propinsi termiskin dengan presentase 13,38%, hal ini menjadi paradoksal ketika disatu sisi menjadi provinsi yang memiliki peluang dan peningkatan atas lapangan kerja disektor pertanian tapi disudut yang lain menjadi salah satu provinsi termiskin di indonesia, ini menjadi indikasi adanya proses tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan progres implementasi kebijakan industrialisasi sebagai salah satu strategi pembangunan daerah tidak berjalan dengan maksimal, Beberapa temuan mengonfirmasi hal tersebut misalnya Primadianti & Sugiyanto, (2020); tentang Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, Dan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat. (Awwalunnisa, 2021); juga menyoroti hal yang sama dalam Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Wiwit Pura, N, Malthuf, M & Gazali, 2021); soal Penerapan Naive Bayes dalam Mengklasifikasikan Masyarakat Miskin di Desa Lepak, lombok Nusa Tenggara Barat, serta (Irwan, M, 2017); tentang Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penanganannya Dalam Ekonomi Islam, Riset tersebut secara umum, mengungkap masalah anti-kesejahteraan.dengan banyaknya penelitian yang mengungkap soal kemiskinan yang menjadi indikator primer dalam masalah kesejahteraan masyarakat, Penelitian-penelitian tersebut menjadi sebagian dari sejumlah kasus dalam

beberapa riset sebelumnya dengan fokus yang berbeda, baik eksplisit maupun implisit mengindikasikan adanya problem dalam implementasi kebijakan atau program di Nusa Tenggara Barat.

Untuk konteks penelitian ini, fenomena permasalahan yang disoroti pada *implementasi kebijakan industrialisasi pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, antara lain adanya indikasi proses tata kelola pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik, terkhusus pada tingkat implementasi program atau kebijakan, hal tersebut terbukti dengan pembangunan yang tidak ekuivalen dengan hasil, seperti potensi program yang bagus dan peluang disektor pertanian yang besar namun sangat kontra-produktif dengan kemiskinan, bahkan membuat pembangunan dan ide-ide kebijakan tidak kompatibel dengan kenyataan.

Berdasarkan persoalan dan beberapa temuan dalam penelitian di atas, dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh perihal fenomena tersebut dan sejauh mana progres implementasi kebijakan atau program industrialisasi pertanian berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, serta di indikasikan ada gap atau kesenjangan yang terpaut jauh antara (*das sollen*) implementasi kebijakan atau program dengan fakta lapangan (*das sein*).

B. Rumusan Masalah

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
2. apakah faktor komunikasi,sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan utama penentuan fokus penelitian ada dua, yaitu pertama fokus pada penetapan batas-batas penelitian dan fokus utama pada penetapan wilayah penelitian, yang kedua mendefinisikan kriteria inklusi-eksklusi untuk informasi baru yang muncul, sugiyono dalam Guntur, (2021).

adapun focus penelitian dari masalah ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat?

D. Tujuan Penelitian

penelitian ini memiliki 2 tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan industrialisasi pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.
2. Mengetahui bagaimana keberhasilan kebijakan industrialisasi pertanian serta faktor yang mempengaruhinya.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan pengembangan penelitian tentang studi ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan akan berdampak pada pemahaman masyarakat terkait implementasi kebijakan industrialisasi serta kaitannya dengan tingkat kesejahteraan pada provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi sejumlah yang berkepentingan baik individu maupun umum, serta lebih lanjut dapat melengkapi kekurangan-kekurangan pada temuan penelitian sebelumnya.
- c. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memaksimalkan implementasi kebijakan industrialisasi yang berbasis pertanian sebagai strategi pembangunan daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian yang relevan.

Sebagai pendasaran bagi penelitian, peneliti dalam hal ini, tentu saja juga mempertimbangkan beberapa hasil penelitian atau riset terdahulu untuk mengetahui beberapa hal, termasuk aspek kekurangan dan kelebihan terkait dengan temuan dan tesis yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak dengan fokus penelitian. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat potensi ruang penelitian yang belum dieksplorasi serta aspek yang telah menjadi fokus riset-riset terdahulu. Antara lain beberapa penelitian yang relevan serta potensial mendukung penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Penelitian Kualitatif oleh Ismail, E.& Mohd noor (2019); tentang perkembangan industri pertanian di sarawak, 1970-1981, penelitian ini memfokuskan perkembangan industri pertanian di Sarawak dari tahun 1970 hingga 1981 dimulai dari kepemimpinan Abdul Rahman Ya'kub memegang tampuk Kerajaan Negeri Sarawak sebagai Ketua Menteri Sarawak sampai tahun terakhir beliau menjabat. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana peranan agensi- agensi yang terlibat dalam membangunkan industri pertanian di Sarawak dalam tempoh yang ditentukan, penelitian ini menggunakan bahan dan data daripada Arkib Negara Cawangan Sarawak, Arkib Negara Malaysia, Pustaka Negeri Sarawak, Pusat Repositori Pustaka Negeri Sarawak, Perpustakaan DBP Cawangan Sarawak. Temuan penelitian ini adalah kerjasama antara Kerajaan Negeri Sarawak dengan

Kerajaan Persekutuan berjaya meningkatkan KDNK menerusi jumlah pengeluaran dan eksport hasil pertanian.

- 2) Penelitian yang dilakukan Sawitri & Soepardi, (2014); tentang Modal Sosial Petani dan Perkembangan Industri di Desa Sentra Pertanian Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang, Tulisan ini mengeksplorasi pengaruh industrialisasi terhadap modal sosial petani padi. Metoda studi yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan kuantitatif untuk memahami perkembangan industri dan pendekatan kualitatif untuk memahami keberadaan modal sosial petani. Temuan studi ini menunjukkan bahwa modal sosial petani lebih besar pada wilayah dengan tingkat industrialisasi yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara industrialisasi dan modal sosial. eroleh kesempatan kerja yang lebih luas sehingga mengubah nilai-nilai lokal.
- 3) Penelitian yang dilakukan Simatupang & Syafa'at, (2016); tentang Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Stratedy Pembangunan Ekonomi Nasional, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan negara berkembang seperti Indonesia, rencana pembangunan jangka panjang komprehensif-integratif sangat diperlukan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas dan kredibilitas pemerintah.
- 4) Penelitian yang dilakukan Wardhiani, (2019); tentang Peran Politik Pertanian dalam Pembangunan Pertanian menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut

dilakukan peneliti untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis dan akurat. peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

- 5) Penelitian kualitatif yang dilakukan Destindira & Nasdian (2018); Hubungan Industrialisasi Pedesaan dengan Tingkat Resiliensi Rumah Tangga Petani. penulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara implementasi industrialisasi pedesaan dengan resiliensi rumah tangga petani. Hasil uji statistik penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara industrialisasi pedesaan dengan strategi nafkah, strategi nafkah dengan resiliensi rumah tangga petani, dan industrialisasi pedesaan dengan resiliensi rumah tangga petani.
- 6) Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Kilmanun & Astuti, (2020); tentang Potensi Dan Kendala Revolusi Industri 4.0. Di Sektor Pertanian, Temuan pada penelitian ini adalah revolusi industri 4.0, terutama di sektor pertanian belum begitu berhasil berkembang. Beberapa kendala penyebab belum berhasilnya revolusi industri 4.0 di Indonesia adalah: (1) Sumberdaya Manusia (2) Kondisi lahan pertanian, dan (3) sosial budaya masyarakat.
- 7) Penelitian yang dilakukan Ayuningtias & Murdianto (2017); tentang Dampak Industrialisasi Pedesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan dampak industrialisasi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat antar kelompok dengan pola

nafkah industri dan non industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan didukung oleh data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hubungan dampak industrialisasi pedesaan dengan kesejahteraan masyarakat antara kelompok dengan pola nafkah industri dan non industri.

- 8) (Rusda et al., 2020); Sosialisasi Pemanfaatan Energi Surya Kepada Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dalam Rangka Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian di Kabupaten Paser, Politeknik Negeri Samarinda bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Paser mengadakan sosialisasi Penggunaan Solar Cell sebagai salah satu pendukung Revolusi Industri 4.0. Sosialisasi ini diberikan dalam bentuk pemaparan dan demonstrasi penggunaan Solar Cell. Peserta terdiri dari para petani dan nelayan yang tergabung dalam Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Paser Kalimantan Timur dan berjumlah 40 petani dan nelayan. Pada sesi terakhir, diberikan kesempatan kepada peserta untuk memberi pertanyaan seputar penggunaan dan pengoperasian Solar Cell. Seluruh pertanyaan dijawab oleh tim sosialisasi dari Politeknik Negeri Samarinda.
- 9) (Wahyu Askar, 2015); Agricultural transformation, economic growth, and poverty in Indonesia, penelitian ini mengeksplorasi keterkaitan antara transformasi pertanian, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan analisis deskriptif, terlihat bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh sektor

jasa dibandingkan sektor pertanian. Dua tantangan utama implementasi transformasi pertanian di Indonesia adalah terbatasnya ketersediaan lahan dan masalah kontrak pertanian. Untuk mengatasi tantangan ini, perubahan bertahap adalah solusi terbaik, sementara dukungan dari pemerintah diperlukan untuk membantu petani kecil agar tidak jatuh miskin.

- 10) (Matina & Praza, 2018); analisis tingkat kesejahteraan petani padi sawah di kabupaten aceh utara, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan petani padi di Aceh Utara. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sawang, Lhoksukon, dan Baktiya sebagai daerah sentra produksi padi di Aceh Utara. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang petani yang melakukan usahatani padi sawah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif berdasarkan indikator kesejahteraan petani yaitu tingkat struktur pendapatan rumah tangga petani, struktur konsumsi pangan rumah tangga, tingkat kinerja ketahanan pangan rumah tangga, tingkat ketahanan pangan rumah tangga. daya beli rumah tangga petani, dan perkembangan nilai tukar petani. Hasil analisis dari indikator struktur pendapatan, struktur konsumsi pangan rumah tangga, tingkat kinerja ketahanan pangan rumah tangga menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani masih rendah dilihat dari tingkat daya beli rumah tangga petani, dan perkembangan ekonomi petani

B. Tinjauan Teory dan Konsep

a. Konsep Implementasi dan Kebijakan publik

1. Konsep implementasi.

perumusan suatu kebijakan selalu dimulai dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi (Brier & lia dwi jayanti, 2020). Karena betapapun baiknya suatu kebijakan tanpa implementasi maka tidak akan bisa memiliki fungsi kebijakan itu sendiri, implementasi menurut Subianto (2020); adalah aktivitas atau usaha- usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan dimana pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Adapun definisi Pelaksanaan (Implementasi) menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (1983;61) dalam Ngetje (2021); yaitu pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang - undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya. keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin dibatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Van Meter dan Van Hont dalam Maulia (2020); membatasi pelaksanaan (implementasi) sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok)

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan (Implementasi) kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III dalam Maunde,R, Posumah,J, &, Kolondam, (2021); implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu :

- Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- Sumberdaya (resource), meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- Sikap birokrasi dan pelaksana (disposisi) adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, kita dapat

mempertimbangkan/ memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- Faktor Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III 1980: 125). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

2. konsep kebijakan publik.

Menurut Edi Suharto (2005), dalam Machmud et al (2017); bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu. Sementara, menurut Elau dan Prewifi dalam buku Edi Suharto, kebijakan adalah Sebuah ketepatan yang berlaku yang didirikan oleh perilaku yang konsistensi dan berulang, baik dari yang membuatnya, maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Said Zainal Abiding (2002) dalam Maunde,R, Posumah,J & Kolondam (2021); menyatakan bahwa secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen yaitu tujuan yang

ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya:

- Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.
- Diinginkan (desirable), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
- Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
- Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat pencapaian kehendak. Dilain sisi ada pendapat menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat ahli lainnya menyebutkan bahwa kebijakan merupakan kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan

kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnyanya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.

Konsep Dimensi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Dunn and William N. (1981) dalam Ekel (2020) ; dimensi implementasi kebijakan publik berkaitan dengan rangkaian proses kebijakan publik, yang secara teoritis terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :

- Tahap-tahap kebijakan publik yaitu penetapan agenda kebijakan (agenda setting) formulasi kebijakan (policy implementation), adopsi kebijakan. implementasi kebijakan (Policy implementation) hingga penilaian kebijakan (Policy assesment).
- Analisis kebijakan yaitu pemilahanpemilahan identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif dan pengusulan alternatif terbaik untuk di implementasikan
- Implementasi kebijakan yaitu berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program, dalam hal ini bagaimana administrator mengatur cara untuk mengorganisir dan mengintrepretasikan hingga menerapkan kebijakan yang telah melalui seleksi.
- Monitoring dan evaluasi kebijakan yaitu dimaksud agar suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan dilakukan monitoring dan evaluasi, untuk mempelajari tentang hasil yang di peroleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan program, mempengaruhi respons dari mereka yang berada diluar kebijakan atau politik.

Menurut Dunn and William N. (1981) dalam Sukaesih Kurniati (2016);

Implementasi kebijakan pada prinsipnya memiliki 3 (tiga) model yaitu :

- Model Perspektif yaitu bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan "sebelum" suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut dengan model produktif, karena seringkali melibatkan teknik-teknik peramalan (forecasting) untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan diusulkan
- Model Retrospektif, yaitu analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan "setelah" suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut model evaluatif, karena banyak menggunakan pendekatan evaluasi terhadap dampak kebijakan yang sedang dan atau telah diterapkan.
- Model Integratif, yaitu perpaduan antara model prospektif dan retrospektif. Model ini kerap kali disebut model komprehensif atau holistik, hal ini dikarenakan analisis ini didasarkan oleh konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin sebelum atau sesudah dilaksanakan atau dioperasikan.

Ada beberapa teori menurut para ahli, untuk dapat digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan publik yaitu :

- a. Teori George C. Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, (Haerul et al., 2016) yaitu:
 - 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran

(target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- 2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
 - 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
 - 4) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
- b. Teori Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (1983). dalam Maunde, R, Posumah, J, & Kolondam (2021); terdiri atas 4 (empat) faktor atau variabel, untuk mengukur berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan publik yaitu :
- 1) Kondisi Lingkungan
 - 2) Hubungan antar organisasi
 - 3) Sumber daya organisasi untuk implementasi program
 - 4) Karakteristik atau kemampuan agen

pelaksana.

- c. Teori menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Aripin & Daud, (2014); terdiri atas 3 (tiga) faktor atau variabel mengukur berhasil tidaknya suatu implementasi kebijakan publik yaitu : 1); Karakteristik Masalah (*tractability of problems*) 2); Karakteristik Kebijakan (*ability of statue of implementation*) 3); Variabel Lingkungan (*non statutory varbles affecting implementation*).
- d. Teori Merilee S. Grindle, Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
- e. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Menurut Meter dan Horn ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Berdasarkan beberapa definisi implementasi kebijakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Publik adalah pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah/organisasi untuk mencapai tujuan.

b. Industrialisasi berbasis pertanian.

1. konsep industrialisasi.

Dalam Indahsari (2016); Victor Riwo Kaho mengungkapkan pengertian industrialisasi dari asal katanya, yaitu industry, Victor mengutip pengertian dasar industri dari kamus Noah Webster sebagai berikut: IN'DUSTRY, n. [L. industria.] *Habitual diligence in any employment, either bodily or mental; steady attention to business; assiduity; opposed to sloth and idleness. We are directed to take lessons of industry from the bee. Industry pays debts, while idleness or despair will increase them.* Victor juga mengutip beberapa padanan kata industri dari The Saurus English Ms Word, yaitu *manufacturing, business, commerce, trade, engineering, production*. Bahkan bisa juga dipadankan dengan kata kata yang lebih sederhana seperti, *hard work, diligence, productiveness, activity*, dst. Dengan demikian, kata industri pada dasarnya bisa diartikan sebagai “mengusahakan sesuatu secara sistematis agar bermanfaat”. Dari pengertian dasar ini, lalu muncul beberapa pengertian khusus seperti manufaktur, bisnis, dagang, rekayasa, produksi, dan lain-lain, yang kesemuanya menggambarkan suatu aktifitas pekerjaan dengan struktur dan proses yang sistematis. Lebih jauh Victor sendiri mengartikan industri sebagai “suatu usaha yang di dalamnya ada struktur dan proses melibatkan banyak pihak yang berkepentingan (stakeholders), dengan tujuan untuk mendatangkan kesejahteraan (terutama ekonomi) bagi pihak-pihak tersebut”.

Sementara itu Purnomo (2016); mendefinisikan industrialisasi sebagai “suatu proses menciptakan interaksi para pihak yang memiliki kepentingan ekonomis, baik terjadi secara alamiah maupun disengaja”. Industrialisasi yang terjadi secara alamiah dipicu oleh pasar. Sebagai contoh, pasar dalam hal ini masyarakat membutuhkan (ada permintaan terhadap) pakaian sehingga memunculkan produsen/penyedia pakaian, seperti usaha usaha konveksi. Untuk memenuhi kebutuhan/permintaan konveksi, bermunculanlah suplier bahan utama dan pendukung konveksi dari hulu ke hilir. petani menyediakan produk kapasnya untuk usaha pemintalan benang. Output usaha ini, yaitu benang, menjadi input pabrik kain yang memberikan outputnya kepada usaha konveksi. Konveksi juga memunculkan usaha pembuatan kancing dan berbagai assesoris pakaian lainnya. Berbagai usaha ini membutuhkan input lain, yaitu tenaga kerja yang disediakan oleh masyarakat.

Selanjutnya, proses delivery berbagai produk setiap usaha ke pasar memerlukan para distributor dari hulu ke hilir. Ketika tingkat persaingan menjurus tak terkendali, bahkan kepentingan lingkungan sosial dan alam harus diakomodir, maka pemerintah turun tangan menjadi wasit. Demikianlah pasar secara alami menciptakan struktur dan interaksi antar stakeholders (proses industrialisasi). Sementara itu, menurut Purnomo, (2016); industrialisasi yang terjadi secara rekayasa adalah industrialisasi yang sengaja oleh pemerintah. Dengan sengaja, pemerintah merencanakan dan melakukan pembangunan pada suatu daerah yang telah ditentukan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), kawasan segitiga emas di suatu wilayah, dst. Dengan pengertian

industrialisasi yang luas tersebut pembangunan daerah ekuivalen dengan proses industrialisasi. Ini berarti, dengan atau tanpa Jembatan Suramadu, Proses industrialisasi akan tetap ada dan berjalan di Madura. Namun, dengan Jembatan Suramadu mobilisasi barang, jasa dan masyarakat dari dan ke Madura semakin cepat sehingga menciptakan efisiensi tersendiri. Pada akhirnya, kondisi ini akan mempercepat proses industrialisasi di Madura tersebut. Bagaimana pun industrialisasi tidak bisa ditolak karena memang diperlukan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Bukti empiris di dunia memperlihatkan bahwa daerah maju ditandai dengan industrialisasi. Sebuah teori model pembangunan yang dikemukakan oleh Walt W. Rostow dikenal dengan model pembangunan Tahapan Pertumbuhan.

Rostow dalam Hannan, (2018); menyatakan bahwa masyarakat komunitas akan mengalami lima tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu: (1) Traditional Society yang dicirikan dengan perekonomian subsisten, keberadaan barter, dan dominasi pertanian/agraris; (2) Pre-conditions dengan ciri-ciri sudah ada pembangunan di bidang pertanian, investasi sudah mulai ada sehingga mulai terjadi proses industrialisasi; (3) Take off: Tahap ini ditandai oleh industrialisasi yang meningkat dan terjadi transformasi struktural perekonomian dari agraris (sektor primer) ke sektor tersier dan sekunder; (4) Drive to Maturity yang ditandai dengan semakin majunya investasi besar, diversifikasi industri, dan peningkatan penggunaan teknologi; (5) High mass consumption tingkatan tertinggi di mana tingkat konsumsi masyarakat tinggi seiring dengan semakin tingginya variasi

produk/jasa, serta mendominasinya sektor jasa/tersier. Dengan demikian, industrialisasi memang diperlukan.

2. Industrialisasi berbasis pertanian.

Industrialisasi umumnya ditandai oleh adanya transformasi struktural perekonomian, yaitu semakin besarnya kontribusi sektor sekunder dan tersier terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seiring dengan menurunnya kontribusi sektor primer (Nurhayati & Kusumawati, 2016). Selanjutnya ditegaskan oleh (Hidayat & MT, 2021); bahwa Jika struktur ekonomi daerah semula berstruktur agraris (dominasi sektor pertanian/primer) yang masih identik dengan sektor berproduktifitas relatif rendah, maka proses industrialisasi diharapkan menggeser struktur ekonomi tersebut ke arah dominasi sektor sekunder dan tersier yang secara bukti empiris mampu memberikan nilai tambah besar terhadap perekonomian/pembangunan daerah. Menurut Patta Rapanna & Zulfikry Sukarno (2017); Industrialisasi dikatakan baik jika menciptakan transformasi struktural perekonomian yang seimbang, yaitu pergeseran kontribusi sektor-sektor terhadap PDRB tersebut diiringi pula dengan pergeseran proporsi tenaga kerja yang bekerja pada sektor-sektor tersebut.

Konsep industrialisasi berbasis pertanian di sini setidaknya memiliki tiga ciri. Pertama, ditandai ditandai oleh adanya transformasi struktural perekonomian yang seimbang. Kedua, industrialisasi difokuskan pada pembangunan masyarakat (community development) yang menganut konsep pembangunan yang berkelanjutan. Ketiga, industri yang dikembangkan adalah sesuai dengan

kompetensi daerah dengan kata lain, mengembangkan kompetensi inti industri daerah dalam hal ini pertanian sebagai potensi pengembangan daerah.

c. Konsep kesejahteraan.

1. Konsep dan indikator kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan didefinisikan sebagai hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman. Definisi tersebut sejalan dengan konsep kesejahteraan yang dikemukakan oleh Nasikun (1996) dalam Oktarian et al (2021) dimana kesejahteraan mencakup empat indikator yaitu: (a) rasa aman, (b) kesejahteraan, (c) kebebasan, dan (d) jati diri. Kemudian terkait dengan ukuran kesejahteraan, menurut Maralani dan Ozcan dalam Rosni, (2017); bahwa pendidikan, pendapatan, dan kekayaan adalah komponen penting untuk mengukur kesejahteraan. Namun dalam perspektif ekonomi, pendidikan sering tidak dimasukkan dalam komponen kesejahteraan ekonomi, tetapi dijadikan sebagai variabel yang ikut memengaruhi kesejahteraan. Kekayaan adalah salah satu indikator kesejahteraan yang lebih stabil secara finansial daripada pendapatan, dan kekayaan dapat menangkap tingkat keamanan ekonomi jangka panjang. Menurut Yulianto & Hidayatullah (2014); Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara. demikian juga dijelaskan oleh Zain et al (2014); bahwa dalam alinea ke empat pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 tersebut telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara yang menganut paham negara kesejahteraan (welfare state). Secara sederhana, itu artinya bahwa Indonesia harus memiliki peran yang besar untuk menciptakan

kesejahteraan bagi rakyatnya. Dan di tegaskan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun (2009); kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata Siregar & Ritonga, (2018). Sedangkan kesejahteraan ekonomi, menurut kamus Wikipedia yang mengutip dari Samuelson dan Nordhausm (2004), dalam Donna NP Butarbutar et al (2020); mengacu pada tingkat kesejahteraan dan standar hidup baik individu atau sekelompok orang. Dalam bidang ekonomi, secara khusus mengacu pada manfaat diperoleh melalui hasil yang diperoleh dari barang dan jasa material. Dengan kata lain, mengacu pada bagian kesejahteraan sosial yang dapat dipenuhi melalui kegiatan ekonomi.

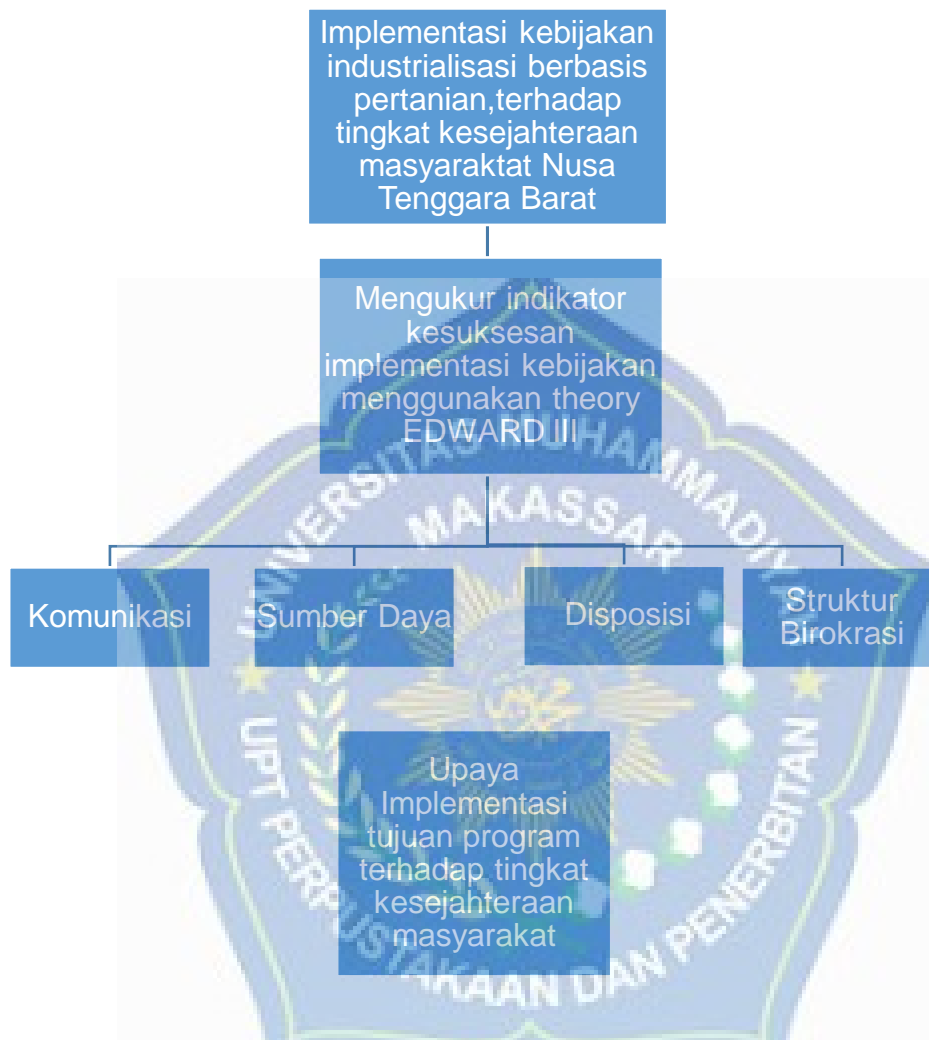
Diantara pendekatan yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan adalah berdasarkan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Engel dalam teorinya mengenai hubungan antara pengeluaran rumah tangga dan pendapatan mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi pangan merupakan fungsi peningkatan pendapatan dan ukuran keluarga, akan tetapi proporsi anggaran untuk makanan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa keluarga yang miskin adalah keluarga dengan porsi anggaran makanan semakin besar (Risa et al 2021). Kesejahteraan memiliki arti yang cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai aspek. Spicker (1998) dalam Yunus, (2018); disebutkan bahwa setidaknya ada lima aspek utama yang

terkait dengan kesejahteraan, yakni aspek kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerja sosial. Kemudian Zastrow dalam Witono (2020); menyatakan bahwa kesejahteraan penduduk meliputi sembilan aspek, yaitu aspek fisik, perumahan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi masyarakat, jaminan sosial, rekreasional, dan aspek pekerja sosial. Dengan mengutip dari Andrianus & Yunekha (2020); tentang Analisis Kesejahteraan Driver Go-Jek di Kota Padang (Pendekatan Objektif dan Subjektif) dan Setiawan (2019); tentang Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (Iks) Di Indonesia, mengemukakan ada dua pendekatan untuk mengukur kesejahteraan yaitu:

- 1) Kesejahteraan diukur dengan pendekatan objektif atau disebut dengan istilah kesejahteraan objektif. Pendekatan dengan indikator ini melihat bahwa tingkat kesejahteraan individu atau kelompok masyarakat hanya diukur secara rata-rata dengan patokan tertentu baik ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan pendekatan yang baku (tingkat kesejahteraan masyarakat semuanya dianggap sama). Ukuran yang sering digunakan yaitu terminologi uang, pemilikan tanah, pengetahuan, energi, keamanan, dll.
- 2) Kesejahteraan diukur dengan pendekatan subjektif atau disebut dengan istilah kesejahteraan subjektif. Pendekatan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sendiri bukan oleh orang lain.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat tani peneliti ingin menggunakan teori Prof. Mubiyarto dalam mengukur indikator kesejahteraan masyarakat tani, dimana Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani, Pendapatan diartikan sebagai selisih antara besarnya penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu pendapatan dapat digambarkan sebagai balas jasa dan kerja sama faktor-faktor produksi yang disediakan oleh petani sebagai penggerak, pengelola, pekerja dan sebagai pemilik modal. Pendapatan merupakan hasil pengurangan antara hasil penjualan dengan semua biaya yang dikeluarkan mulai dari masa tanam sampai produk tersebut berada ditangan konsumen akhir. Artinya mengukur indikator kesejahteraan petani berdasarkan "saving saldo" atau stagnan/modal kembali. Selain itu untuk mengukur tingkat validasi dari teori ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian yang menggunakan teori dari tersebut dalam mengukur indikator kesejahteraan petani, seperti Sutrisma et al (2022); tentang analisis pendapatan, pengeluaran rumah tangga dan tingkat kesejahteraan petani padi sawah Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. juga oleh Ardika & Budhiasa (2017); analisis tingkat kesejahteraan petani di Desa Bangle Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Dan Mudatsir (2021); analisis pendapatan rumah tangga dan tingkat kesejahteraan petani kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Tengah. serta Ardiratna et al (2018); pengaruh luas lahan terhadap tingkat kesejahteraan petani padi kecamatan Sragen.

C. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif (*Mixed method*). Menurut Creswell (2010:5) dalam Ningsih & Arief, (2021); mengatakan mixed methods merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, artinya adalah penelitian yang menggunakan jenis data yang berbeda antara kualitatif dan kuantitatif, namun dipakai untuk saling menopang pada sebuah kepentingan penelitian tanpa harus menghilangkan esensi di antara kedua jenis data tersebut. Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk mendukung serta melengkapi data kualitatif. Alasan peneliti menggunakan kedua metode tersebut adalah karena waktu penelitian sangat terbatas, sedangkan pengumpulan dua jenis data (kualitatif dan kuantitatif) dapat dilakukan secara bersamaan dan Satu data berfungsi sebagai pendukung untuk jenis data lainnya.

Metode kualitatif digunakan untuk mengungkap bagaimana upaya pelaksanaan implementasi kebijakan industrialisasi pertanian

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk melihat bagaimana faktor- faktor keberhasilan yang dikemukakan Edward III dalam mempengaruhi implementasi kebijakan industrialisasi pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan studi kepustakaan, dalam mengumpulkan data studi kepustakaan menggunakan berbagai macam material seperti dokumen, buku, jurnal, artikel, referensi hasil penelitian sebelumnya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini berlangsung selama dua bulan setelah pelaksanaan seminar proposal. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas pertanian dan Dinas Perindustrian provinsi Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karna merupakan pusat terkait sektor pertanian dan perindustrian atau komponen Pemerintah Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data dan sumber data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Data primer

Sumber data primer merupakan data utama penelitian dan tanggapan responden, yang akan diukur dengan menggunakan alat penelitian (kuesioner) yang bertujuan untuk mengetahui jawaban responden atas pertanyaan yang diberikan.

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mendukung data penelitian, yaitu data yang diperoleh melalui hasil observasional dan hasil analisis dokumen, Data sekunder berasal dari sumber data yaitu data observasional tentang implementasi kebijakan industrialisasi pertanian, yang diperoleh dari literature, jurnal, artikel, dan informasi yang penulis cari, seperti jumlah dan data-data.

D. Tehnik Pengumpulan Data.

Sugiyono dalam (Thalib, 2022) teknik pengumpulan data meliputi langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu diawali dengan pengumpulan data kualitatif dan kemudian pengumpulan data kuantitatif.

1. Pengumpulan Data secara kualitatif.

a. Observasi (pengamatan)

Objek yang akan diteliti adalah terkait implementasi

kebijakan industrialisasi disektor pertanian,serta kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada tahap awal sebelum melakukan wawancara. Observasi dilakukan dengan datang ke lokasi untuk melihat secara langsung, mengamati, dan mencatat hal-hal yang diselidiki, untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai proses implementasi kebijakan industrialisasi di Nusa Tenggara Barat.

Data yang dikumpulkan pada saat observasi yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh berupa hasil wawancara mengenai implementasi kebijakan tersebut yang dilakukan dengan beberapa informan yang telah ditentukan. Data sekunder yang diperoleh berupa,buku, artikel maupun jurnal, publikasi pemerintah serta laporan-laporan sebelumnya yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari

b. Wawancara (interview)

Dalam mendapatkan data dan informasi, peneliti melakukan wawancara bersama beberapa informan dengan mendatangi langsung lokasi penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyediakan beberapa pertanyaan yang akan disampaikan mengenai informasi yang dibutuhkan berdasarkan tujuan penelitian ini. Dalam

wawancara ini peneliti menentukan beberapa informan, yang di anggap memiliki kapasitas dan kewenangan.

c. Studi pustaka

Studi pustaka yang dilakukan adalah dengan membaca dan menelaah buku dan berbagai literature melalui internet yang berhubungan dengan konsep dan teori yang mendukung pembahasan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan kajian- kajian terhadap dokumen untuk memperoleh data berupa tulisan, gambar, dan karya-karya tentang proses pelaksanaan Implementasi Kebijakan industrialisasi disektor pertanian dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.. Dokumen primer berupa dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami peristiwa tersebut, sementara dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan laporan atau cerita orang lain.

2. Pengumpulan Data secara Kuantitatif.

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagian pegawai yang ada di dinas perindustrian dan perdagangan serta dinas pertanian, Provinsi Nusa Tenggara

Barat.

b. Sampel

Jenis sampling *nonprobability* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, dimana semua populasi dijadikan sampel. Maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi yang diambil.

c. Kuesioner (angket)

Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara diisi oleh responden yang telah ditentukan. Jumlah kuesioner sebanyak jumlah responden, Cara membuat kuesioner terbagi menjadi dua, yaitu dari sisi format pertanyaan dan model jawaban . Pengujian hipotesis digunakan dengan metode statistik. Untuk memperoleh informasi dari responden digunakan metode angket atau kuesioner sebagai alat pengumpul data. Kuesioner ini disusun sesuai indikator dari variabel yang diteliti, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang disediakan. Angket menggunakan skala Likert (skala empat), yaitu dari jawaban yang paling positif sampai yang paling negatif.

Tahap-tahap pengolahan dan analisis data kuantitatif hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan akan kelengkapan jawaban.

Pada tahap ini data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mencari jawaban dari kuesioner yang tidak lengkap.

2. Menghitung jumlah atau frekuensi dari masing-masing jawaban dalam kuesioner.

3. Menghitung persentase jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal melalui distribusi frekuensi dan persentase.

Jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner terstruktur diberi skor atau bobot antara 1 sampai 4, dengan rincian:

- a. Jawaban sangat sering/sangat aktif = 4
- b. Jawaban sering/sangat aktif = 3
- c. Jawaban kadang-kadang/kurang aktif = 2
- d. Jawaban jarang/tidak pernah = 1

Cara menghitung persentase skor penilaian yang dilakukan berdasarkan skor ideal, dimana nilainya tergantung pada jumlah responden yang ingin melihat, maka:

Skor ideal (skor tertinggi) = $N \times \text{bobot nilai tertinggi}$

Skor terendah = $N \times \text{bobot nilai terendah}$

Di mana N = Jumlah keseluruhan responden

Dari 30 orang responden Dengan kategori skor tertinggi adalah 4 dan terendah diberi skor 1, sehingga skor ideal untuk setiap item pertanyaan adalah:

$$69 \text{ responden} \times 4 = 276$$

Sehingga persentase penggolongan skor

penilaian adalah: Jumlah skor

$$\frac{\text{Jumlah skor}}{\text{Skor ideal}} \times 100 \%$$

Sedangkan kriteria interpretasi skor berdasarkan persentase kelompok responden, peneliti membuat suatu ukuran yaitu sebagai berikut:

1. Sangat sering/sangat baik : >75% - 100%
2. Sering/baik : > 50% - 75%
3. Kadang-kadang/Kurang Baik : >25% - 50%
4. Tidak pernah/Tidak Baik : 0% - 25. %

Hasil perhitungan kuantitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan tabel. apa yang kemudian menjadi bahan masukan untuk analisis selanjutnya yaitu analisis kualitatif.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua analisis, yaitu diawali dengan analisis deskriptif kualitatif dan dilanjutkan dengan analisis deskriptif kuantitatif.

1. Analisis Data Kualitatif

Pada rumusan masalah pertama, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dalam hal ini digunakan untuk menggambarkan upaya pelaksanaan kebijakan industrialisasi di sektor pertanian lalu pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat. mulai dari bagaimana pelaksanaan kebijakan hingga keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Analisis kualitatif dalam penelitian ini mencakup beberapa tahap sebagai berikut:

a. Pengelompokan data

Pengelompokan data dilakukan untuk memudahkan analisis data yang telah dikumpulkan. Pengelompokan data dilakukan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian. Hasil pengelompokan data adalah kumpulan data penelitian yang merupakan data hasil wawancara, hasil observasi dan hasil analisis dokumen

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data. Data disederhanakan jika hasil agregasi

data ternyata serupa data atau data yang berarti hal yang sama. Data yang sama atau serupa direduksi menjadi data tunggal. Data disederhanakan berdasarkan hasil wawancara. Data disederhanakan untuk membuat data lebih mudah ditafsirkan. Data disederhanakan agar lebih mudah menjawab rumusan masalah penelitian.

c. Interpretasi data

Interpretasi data adalah proses menginterpretasikan data atau menerjemahkan data penelitian. Interpretasi data mengarah pada temuan penelitian. Proses penafsiran data dilakukan untuk memenuhi rumusan masalah dalam penelitian.

d. Penarikan kesimpulan

Hasil interpretasi data digunakan sebagai dasar untuk menarik atau menarik kesimpulan penelitian. Kesimpulan penelitian adalah jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian.

2. Analisis Data Kuantitatif.

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk

menjawab rumusan masalah kedua. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif ini, maka dapat diperoleh deskripsi mengenai pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

a) Analisis deskriptif

Analisis deskriptif, yaitu metode analisis data yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang sedang dihadapi.

b) Analisis regresi linear berganda

Jika jumlah variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel independen, maka hubungan antara kedua variabel disebut analisis regresi berganda (*multiple regression*). Bentuk rumusannya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

di mana:

Y = Variabel dependen

a = Konstanta b_1, b_2, b_3 , = Koefisien regresi

e = variabel random berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 0

X_1 = komunikasi

X_2 = sumber daya

X_3 = disposisi

X_4 = struktur birokrasi

Y = Pengaruh industrialisasi pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antar variabel dependen (Y) dengan variabel independen X_1, X_2, X_3, X_4 maka hipotesis yang digunakan adalah:

1. $H_0: b_1 = b_2 = b_3 \dots b_k = 0 \rightarrow$ merupakan model linier berganda yang

tidak signifikan atau dengan kata lain, tidak ada hubungan linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

2. $H_0: b_1 \neq b_2 \neq b_3 \dots b_k \neq 0 \rightarrow$ merupakan model regresi linear berganda signifikan atau dengan kata lain ada hubungan atau pengaruh linear antara variabel independen dengan variabel dependen.

c) Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik apa yang harus ditemukan dalam analisis regresi linier berganda berdasarkan ordinary least square (OLS). Tidak semua tes asumsi klasik harus dikatakan untuk analisis regresi linier, misalnya uji multikolineitas tidak dapat digunakan dalam analisis regresi linier sederhana.

Tahapan dalam pengujian regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengangguran dan inflasi mempengaruhi tingkat kemiskinan atau tidak. Inilah sebabnya mengapa modelnya seperti sebelum digunakan harus mematuhi beberapa asumsi, yang biasa disebut sebagai asumsi klasik. Asumsi-asumsi tersebut antara lain

1. Uji normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menetapkan apakah setiap variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Tujuan dari uji normalitas data untuk mengetahui apakah suatu variabel tergantung

(pengaruh industrialisasi pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat), mandiri (karakter masalah, kualitas kebijakan, variabel non peraturan,) atau ketiganya didistribusikan secara normal, mendekati normal atau tidak. Untuk menguji normalitas menggunakan uji grafik dapat digunakan dengan melihat grafik normal plot probabilitas, yaitu deteksi dengan pencarian penyebaran data (titik) di sepanjang sumbu diagonal bagan.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk memeriksa apakah ada ketidaksetaraan dalam varians dan sisa satu pengamatan satu untuk pengamatan pengamatan bahwa lainnya. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada heteroscedivitas atau homoskedastisitas dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas (karakter masalah, kualitas kebijakan, variabel non peraturan) versus variabel terikat (pengaruh industrialisasi pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat). Jika varians dari sisa satu pengamatan ke pengamatan lainnya diperbaiki, maka yang disebut homoskedastisitas. Jenis regresi yang baik adalah homoskedastisitas yang terjadi dalam model, atau dengan kata lain tidak terjadi. Adapun cara deteksi heteroskedstisitas dapat dilakukan dengan metode grafik sebar. Dengan memplot nilai ZPRED (nilai perkiraan) dengan SRESID (nilai residu), untuk menguji nya bisa diketahui dari nilainya.

Korelasi peringkat yang signifikan, yaitu:

- a. Jika nilai signifikan $>$ dari α (5%) maka tidak terdapat heteroskedstisitas
- b. Jika nilai signifikan $<$ dari α (5%) maka terdapat heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolineritas adalah keadaan di mana satu atau lebih variabel independen (karakter masalah, kualitas kebijakan, variabel non peraturan) dinyatakan sebagai kontribusi linier dari variabel independen lainnya. Tes multikolineritas dimaksudkan untuk mengetahui apa hubungan antar variabel bebas memiliki masalah multikolineritas atau tidak.

Dalam penelitian ini, model regresi dengan variabel bebasnya *karakteristik masalah, kualitas kebijakan, dan variabel non peraturan*. dengan variabel terikatnya adalah pengaruh industrialisasi pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Model tersebut untuk mencari pengaruh antara *karakteristik masalah, kualitas kebijakan, dan variabel non peraturan* terhadap pengaruh industrialisasi pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak boleh ada korelasi yang tinggi antara karakteristik masalah, kualitas kebijakan, dan variabel non peraturan.

Apabila ditemukan permasalahan multikolineritas, beberapa cara berikut ini dapat digunakan sebagai

pemecahannya, antara lain:

- a) Menambah jumlah data dengan pengamatan baru
- b) Menghilangkan variabel tertentu dari model yang di peroleh

4. Uji t (uji parsial)

Uji t (t-test) melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan.

$$t = \frac{r \sqrt{n - 2}}{\sqrt{1 - r^2}}$$

Keterangan :

t=Distribusi tr=Koefisien

r²= Koefisien determinasi

n=jumlah data

(t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

H₀ diterima jika nilai t hitung < ttabel atau nilai sig > α

H_a ditolak jika nilai t hitung > ttabel atau nilai sig > α

Bila terjadi penerimaan H₀ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H₀ ditolak

artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

Rancangan pengujian hipotesis statistik ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel independen (X) yaitu pola kemitraan terhadap volume pengunjung (Y), adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

$H_0: \beta=0$: tidak terdapat pengaruh yang signifikan

$H_a: \beta \neq 0$: terdapat pengaruh yang signifikan

5. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi adalah ukuran untuk menentukan kepatuhan atau akurasi antara nilai yang diasumsikan atau garis regresi dan data sampel. Kalau nilai koefisien korelasi diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien penentuan dapat diperoleh dengan kuadratnya. Besarnya koefisien dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = koefisien determinasi

r^2 = koefisien korelasi

kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

- a. Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
- b. Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen kuat

F. Pengecekan Keabsahan Data

a. Keabsahan data kualitatif

Kebenaran hasil penelitian kualitatif banyak yang diragukan, karena meliputi *pertama*, Subjektivitas penelitian berpengaruh besar dalam penelitian kualitatif, *kedua*, Instrumen penelitian mengandung banyak kelemahan, terutama bila melakukan wawancara secara terbuka dan tanpa kontrol, dan *ketiga*, Sumber data kualitatif yang kurang dapat dipercaya sehingga kurang mempengaruhi hasil akurasi penelitian.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data. Menurut Lincoln dan Guba dalam Zainal Arifin, memeriksakan keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan empat kriteria, yaitu kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), keterikatan (*dependability*), dan kepastian (*confinnability*).

b. Keabsahan Data Kuantitatif

Kuesioner dibagikan kepada seluruh responden, kemudian Jawaban dikembalikan kepada peneliti, tersusun dengan rapi dan hati-hati. Selanjutnya hasil pernyataan kembali responden diuji kuantitatif melalui uji validitas dan reliabilitas.

i. Uji validitas

Uji validitas berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang atau diganti karena dianggap tidak relevan umar dalam (Setyawantika & Wiranto, 2016) Pengujian validitas ini dilakukan secara statistik,

yang dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 19, dengan langkah-langkah pengukurannya sebagai berikut:

1. Melakukan uji coba kuesioner yang telah dikembalikan oleh 9 responden.
2. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban, yang dalam penelitian ini terdapat 25 pernyataan untuk variabel X1, X2, X3, X4
3. serta 7 pernyataan untuk variabel Y.
4. Selanjutnya, dari hasil tabulasi jawaban tersebut dihitung korelasi antardata pada masing-masing pernyataan dengan skor total menggunakan rumus korelasi product moment, yang rumusnya sebagai berikut:

$$r_{11} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

dimana:

r = indeks korelasi product moment
n = jumlah responden

X = skor item angket
Y = skor total angket

$\sum XY$ = jumlah dari instrumen x yang dikali dengan jumlah instrumen y

$\sum X^2$ = jumlah kuadrat kriteria X

$\sum Y^2$ = jumlah kuadrat kriteria Y

Hasil perhitungan r dikonsultasikan dengan harga r kritik product moment dengan taraf signifikansi 5%. Jika

harga r hitung lebih besar dari r tabel maka dikatakan item soal itu valid. Atau dengan melihat hasil masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan hasil yang signifikan. Nilai korelasi yang diperoleh akan diuji kemudian untuk menunjukkan apakah nilai tersebut signifikan atau tidak. Caranya adalah dengan uji korelasi. Jika semua nilai korelasi yang ada ditemukan signifikan, maka soal-soal tersebut memiliki validitas konstruksi, artinya terdapat konsistensi internal pada soal-soal tersebut. Jika ada pertanyaan yang dianggap tidak penting, pertanyaan tersebut harus diganti atau di buang dan kemudian diuji ulang sampai valid.

Uji validitas dengan korelasi Pearson, menggunakan SPSS, harus memenuhi kriteria valid apabila korelasinya bernilai positif dan nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] < taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Sebaliknya, jika tidak memenuhi kriteria di atas maka instrumennya dianggap tidak valid.

ii. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk mengetahui apakah instrumen dalam hal ini angket dapat digunakan lebih dari satu kali, minimal oleh responden yang sama. Dengan kata lain, kuesioner harus konsisten umardalam (Misroji, 2014).

Karena skor dalam kuesioner penelitian ini menggunakan

angka 1 sampai dengan 5, maka untuk mencari reliabilitas instrumen dipergunakan rumus Alpha Cronbach (Cronbach's Alpha). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \delta b^2}{\delta t^2} \right)$$

dimana:

r_{11} = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir

pertanyaan δt^2 = varian total

$\sum \delta b^2$ = jumlah varians butir

Jumlah varian butir ditetapkan dengan cara mencari nilai varian tiap butir, kemudian dijumlahkan, dengan rumus varian yang digunakan:

$$\delta^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n-1}}{n-1}$$

di mana:

δ = varian tiap butir

n = jumlah responden

X = nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pertanyaan)

reliabilitas dikonsultasikan dengan harga *r product moment* pada taraf signifikan 5%. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka dapat dikatakan reliable



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Luas dan batas wilayah administrasi

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 2 pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa dan dikelilingi oleh 280 pulau-pulau kecil. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 49.312,19 Km² terdiri dari daratan seluas 20.153,15 Km² (40,87%) dan perairan laut seluas 29.159,04 Km² (59,13%) dengan panjang garis pantai 2.333km. Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km² (76,49 %) dan luas Pulau Lombok seluas 4.738,70 Km² (23,51%).

b. Letak dan kondisi geografis

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46' - 119°5' Bujur Timur dan 8°10' - 9°5' Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Secara Administratif Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota dengan 116 wilayah kecamatan dan 1.146 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah wilayah

kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki wilayah administrasi desa/kelurahan terbanyak dengan 254 desa/kelurahan dengan jumlah kecamatan sebanyak 20 kecamatan, sebagaimana table berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah (s.d April 2023)

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Luas wilayah (Km ²) | Persentase(%) |
|----|----------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | LombokBarat | 10 | 122 | 1.053,92 | 5,23 |
| 2 | LombokTengah | 12 | 139 | 1.208,40 | 6,00 |

| No | Kabupaten/Kota | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Luaswilayah (Km ²) | Persentase(%) |
|--------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|
| 3 | LombokTimur | 20 | 254 | 1.605,55 | 7,97 |
| 4 | LombokUtara | 5 | 33 | 809,53 | 4,02 |
| 5 | Sumbawa | 24 | 166 | 6.643,98 | 32,97 |
| 6 | Dompu | 8 | 81 | 2.324,60 | 11,53 |
| 7 | Bima | 18 | 198 | 4.389,40 | 21,78 |
| 8 | SumbawaBarat | 8 | 65 | 1.849,02 | 9,17 |
| 9 | KotaMataram | 6 | 50 | 61,30 | 0,30 |
| 10 | KotaBima | 5 | 38 | 207,50 | 1,03 |
| Jumlah | | 116 | 1.146 | 20.153,15 | 100 |

Sumber:NTB Dalam Angka 2023

c. Topografi

Topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0-3.726 m dpl untuk PulauLombok, dan 0-2.755 m dpl untuk Pulau Sumbawa. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian palingtinggi,yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan 11

m dpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.

Berdasarkan pada klasifikasi ketinggian wilayah maka diketahui bahwa wilayah yang memiliki ketinggian 0-100 m dpl sekitar 23,76% atau seluas 478,911 Ha, ketinggian 100-500 m dpl sekitar 37,39% atau seluas 753,612 Ha, ketinggian 500-1000 m dpl sekitar 15,25% atau seluas 307,259 Ha dan lebih dari 1000 mdpl seluas 475,533 Ha 23,60%. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.726 m dpl, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 mdpl dari Sembilan gunung yang ada (NTB Dalam Angka 2013).

Kemiringan tanah didominasi oleh kemiringan tanah berkisar antara 15-40% seluas 704.619 Ha (34,96%) sedangkan yang paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0-2% seluas 338.552 Ha (16,80%). Untuk Pulau Lombok klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2-15% seluas 198.616 Ha (9,85%) sedangkan yang paling sempit klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40% seluas 20.175 Ha (1,01%). Sedangkan Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah yang paling luas berkisar antara 15-40% seluas 573.903 Ha (28,48%) dan yang paling sempit kemiringan tanah 0-2% seluas 214.194 Ha (10,63%).

d. Geologi

Keadaan geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta alluvium (resend). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit,

tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuartar di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuartar di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung apitua, gunung api Sangiang, gunung api Tambora, gunung api mudadan batu gamping koral. Aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok.

e. Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 dari kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Mataram Metro meliputi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Labuapidan Kecamatan Kediridengan sector unggulan perdagangan, jasa, industry dan pariwisata;
2. Senggigi-Tiga Gili (Air, Meno dan Trawangan) dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara dengan sector unggulan pariwisata, industry dan perikanan;
3. Agropolitan Rasimas di Kabupaten Lombok Timur dengan sektor unggulan pertanian, industry dan pariwisata;
4. Kute dan sekitarnya di Kabupaten Lombok Tengah, sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sebagian wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan sector unggulan pariwisata, industry dan perikanan;
5. Agroindustri Pototano berada di Kabupaten Sumbawa Barat

dengan sector unggulan pertanian dan industri;

6. Agropolitan Alas Utan berada di Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata;
7. Lingkar Tambang Batu Hijau dan Dodo Rinti berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa dengan sektor unggulan pertambangan, pertanian dan pariwisata;
8. Teluk Saleh dan sekitarnya berada di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu masing-masing beserta wilayah perairannya dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan dan industri;
9. Agropolitan Manggalewa berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan dan industri;
10. Hu'u dan sekitarnya berada di Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian dan perikanan;
11. Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sector unggulan perikanan, pariwisata dan industri;
12. Waworada-Sape dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dengan sector unggulan perikanan, pariwisata dan industri.

f. Demografi

a. Jumlah penduduk

Berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.587.562 jiwa. Dengan rincian, laki-laki sebanyak 2.228.493 jiwa dan perempuan sebanyak 2.359.069 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,46. Jumlah penduduk NTB tahun 2012 sebanyak 4.587.562 orang meningkat sebesar 3,03% atau 41.912 orang dibandingkan dengan penduduk tahun 2011. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil berada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten atau Kota 2023 Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional

| No | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | RasioJK |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | LombokBarat | 300.364 | 312.797 | 613.161 | 96,03 |
| 2 | LombokTengah | 414.602 | 460.629 | 875.231 | 90,01 |
| 3 | LombokTimur | 524.126 | 599.362 | 1.123.488 | 87,45 |
| 4 | Sumbawa | 216.066 | 206.963 | 423.023 | 104,40 |

| No | Kabupaten/Kota | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | RasioJK |
|----|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 5 | Dompu | 113.164 | 110.514 | 223.678 | 102,40 |
| 6 | Bima | 222.883 | 224.403 | 447.286 | 99,32 |
| 7 | SumbawaBarat | 60.201 | 58.407 | 118.608 | 103,07 |
| 8 | LombokUtara | 100.500 | 103.064 | 203.564 | 97,51 |
| 9 | KotaMataram | 204.676 | 208.534 | 413.210 | 98,15 |
| 10 | KotaBima | 71.911 | 74.396 | 146.307 | 96,66 |
| | Jumlah/Total | 2.228.493 | 2.359.069 | 4.587.562 | 94,46 |

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (NTB Dalam Angka 2023)

b. Pertumbuhan penduduk

Penduduk Nusa Tenggara Barat terdistribusi tidak merata, karena 70,4% (3.228.654 jiwa) berdomisili di Pulau Lombok dan selebihnya 29,6% (1.358.908 jiwa). Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Penyebaran Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2022 (jiwa)

| No. | Kabupaten/ Kota | Jumlah Penduduk (jiwa) | | | | |
|-----|--------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Lombok Barat | 816.523 | 829.777 | 599.986 | 606.044 | 613.161 |
| 2 | Lombok Utara | - | - | 200.072 | 202.092 | 203.564 |
| 3 | Lombok Tengah | 844.105 | 856.675 | 860.209 | 868.895 | 875.231 |
| 4 | Lombok Timur | 1.068.486 | 1.080.237 | 1.105.582 | 1.116.745 | 1.123.488 |
| 5 | Kota Mataram | 362.243 | 375.506 | 402.843 | 406.910 | 413.210 |
| | Pulau Lombok | 3.091.357 | 3.142.195 | 3.168.692 | 3.200.686 | 3.228.654 |
| 6 | Sumbawa Barat | 99.056 | 101.089 | 114.951 | 116.112 | 118.608 |
| 7 | Sumbawa | 413.869 | 420.750 | 415.789 | 419.987 | 423.029 |
| 8 | Dompu | 213.185 | 217.479 | 218.973 | 221.184 | 223.678 |
| 9 | Bima | 416.446 | 420.207 | 439.228 | 443.663 | 447.286 |
| 10 | Kota Bima | 129.843 | 132.292 | 142.579 | 144.018 | 146.307 |
| | Pulau Sumbawa | 1.272.399 | 1.291.817 | 1.331.520 | 1.344.964 | 1.358.908 |
| | Provinsi NTB | 4.363.756 | 4.434.012 | 4.500.212 | 4.545.650 | 4.587.562 |

Sumber: BPS NTB, 2023

Penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2012 mengalami peningkatan disebabkan oleh kelahiran alami dan migrasi penduduk. Rata-rata pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 1,70 %. Proporsi jumlah penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki atau sex ratio rata-rata mencapai 93,14. Artinya bahwa 100 orang penduduk perempuan, penduduk laki-laki sejumlah 93 orang. Adapun pertumbuhan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki dengan sex ratio pada tahun 2012 mencapai 94,46 yang berarti dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 94,46 penduduk laki-laki. Kepadatan Penduduk menunjukkan bahwa Kota Mataram memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kepadatan penduduk terendah.

c. Struktur dan komposisi penduduk

Menurut kelompok umur, komposisi penduduk terbanyak pada umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 485.171 jiwa, sedangkan penduduk terkecil pada kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 122.048. Secara keseluruhan penduduk yang produktif atau kelompok umur 15-64 tahun sebanyak 64,45%. Sampai saat ini, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki. sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023

| Kelompok umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| u 0-4 | 249.049 | 236.122 | 485.171 |
| m 5-9 | 240.696 | 228.204 | 468.900 |
| b 10-14 | 237.417 | 225.419 | 462.836 |
| e 15-19 | 219.129 | 216.251 | 435.380 |
| r 20-24 | 180.825 | 211.291 | 392.116 |
| r 25-29 | 183.099 | 221.393 | 404.492 |
| · 30-34 | 168.309 | 197.901 | 366.210 |
| N 35-39 | 161.534 | 182.123 | 343.657 |
| T 40-44 | 138.026 | 153.336 | 291.362 |
| B 45-49 | 116.058 | 126.111 | 242.169 |
| D 50-54 | 101.791 | 109.457 | 211.248 |
| a 55-59 | 73.784 | 74.186 | 147.970 |
| a 60-64 | 59.525 | 62.523 | 122.048 |
| l 65+ | 99.251 | 114.752 | 214.003 |
| Jumlah/Total | 2.228.493 | 2.359.069 | 4.587.562 |

Berdasarkan rasio penduduk menurut jenis pendidikan menunjukkan bahwa penduduk perempuan memiliki rasio terbanyak pada jenjang pendidikan SD sebesar 33,4% di Kota Bima dan ratio terendah pada jenjang akademis sebesar 1,1% di Kabupaten Lombok Utara. Demikian pula halnya dengan rasio terbesar untuk penduduk laki-laki berada pada jenjang SMA sebesar 37,1% di Kota Bima dan terendah pada jenjang akademi sebesar 0,9% di Kabupaten Lombok Utara,

g. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan social juga merupakan bagian yang terpisahkan dari pembangunan daerah serta memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan di bidang dan sektor

yang lainnya. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk menanggulangi dan menuntaskan berbagai permasalahan diantaranya masalah kemiskinan, orang cacat, ketertinggalan, ketertelantaran, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, kekerasan dan korban akibat bencana alam maupun bencana sosial. Dalam tabel berikut memperlihatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Prov. NTB dari tahun 2018 hingga tahun 2023.

Tabel 2.21 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat Tahun 2018-2023.

| No. | Indikator | Satuan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Anak Terlantar | Jiwa | 200.630 | 201.699 | 205.116 | 205.116 |
| 2 | Anak Jalanan | Jiwa | 10.181 | 10.005 | 3.327 | 3.327 |
| 3 | Penyandang cacat | Jiwa | 397.569 | 161.147 | 28.690 | 16.098 |
| 4 | Tuna Susila | Jiwa | 446 | 440 | 508 | 508 |
| 5 | Pengemis | Jiwa | 558 | 339 | 274 | 274 |
| 5 | Gelandangan | Jiwa | 651 | 1.275 | 1.746 | 1.746 |

| No. | Indikator | Satuan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 | Korban Napza | Jiwa | 2.238 | 1.530 | 2.707 | 2.707 |
| 7 | Keluarga Fakir Miskin | KK | 451.35 | 434.89 | 373.75 | 373.75 |
| | | | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Keluarga Berumah Tidak Layak Huni | KK | 117.49 | 178.90 | 172.82 | 172.82 |
| | | | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 9 | Komunitas Adat Terpencil (KAT) | KK | 8.938 | 6.432 | 9.091 | 2.758 |
| |) | | | | | |
| 10 | Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) | Jiwa | 3 | 3 | - | 708 |
| | A) | | | | | |

Sumber: Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB Tahun 2016 (LKPJAMJ 2017-2022)

B. Hasil Penelitian

a. Hasil Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan metode analisis statistik. Adapun program yang digunakan oleh peneliti adalah "SPSS Versi 26 for Windows". Pada uji asumsi klasik terdapat beberapa uji yang terdiri dari, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji Multikoleniaritas dan uji regresi linier berganda.

1. Uji Validitas

Untuk mengetahui valid atau tidaknya variabel penelitian maka digunakan uji validitas. Untuk mengetahui apakah layak atau tidaknya suatu item yang diuji. Uji validitas memiliki standar korelasi yang ditentukan dari besar responden yang digunakan dengan menggunakan rumus:

$$Df = n - 2$$

$$n = 69 - 2$$

$$n = 67 \text{ responden}$$

69 responden yang akan dianalisis maka besar R tabel yang digunakan ialah 0,05. Untuk mengetahui apakah kuisioner dikatakan valid atau tidak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

| | Item Pernyataan | Corrected item total correlation | R Tabel n=67 taraf 5% | Keterangan |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Komunikasi (X1) | X11 | 0,236 | 0,698 | Valid |
| | X12 | 0,236 | 0,732 | Valid |
| | X13 | 0,236 | 0,571 | Valid |
| | X14 | 0,236 | 0,670 | Valid |
| | X15 | 0,236 | 0,673 | Valid |
| | X16 | 0,236 | 0,536 | Valid |
| Sumber daya (X2) | X21 | 0,236 | 0,639 | Valid |
| | X22 | 0,236 | 0,605 | Valid |
| | X23 | 0,236 | 0,584 | Valid |
| | X24 | 0,236 | 0,667 | Valid |
| | X25 | 0,236 | 0,753 | Valid |
| | X26 | 0,236 | 0,737 | Valid |
| Disposisi (X3) | X31 | 0,236 | 0,734 | Valid |
| | X32 | 0,236 | 0,752 | Valid |
| | X33 | 0,236 | 0,698 | Valid |
| | X34 | 0,236 | 0,800 | Valid |
| | X35 | 0,236 | 0,837 | Valid |
| | X36 | 0,236 | 0,793 | Valid |
| Struktur Birokrasi (X4) | X41 | 0,236 | 0,598 | Valid |
| | X42 | 0,236 | 0,632 | Valid |
| | X43 | 0,236 | 0,690 | Valid |
| | X44 | 0,236 | 0,741 | Valid |
| | X45 | 0,236 | 0,807 | Valid |
| | X46 | 0,236 | 0,624 | Valid |
| Implementasi Kebijakan (Y) | Y1 | 0,236 | 0,843 | Valid |
| | Y2 | 0,236 | 0,776 | Valid |
| | Y3 | 0,236 | 0,735 | Valid |
| | Y4 | 0,236 | 0,769 | Valid |
| | Y5 | 0,236 | 0,787 | Valid |

Berdasarkan hasil uji validitas memperlihatkan item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian memiliki r tabel lebih besar atau di atas 0,236 Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan tentang variabel WFH dan Produktivitas dinyatakan valid sebagai alat ukur variabel.

2. uji reliabilitas

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Setelah didapat reliabilitas instrumen (r -hitung), maka nilai tersebut dibandingkan dengan r -tabel yang sesuai dengan jumlah responden dan taraf nyata. Apabila r -hitung $>$ r -tabel, maka instrumen tersebut dikatakan reliabel, untuk uji reliabilitas digunakan teknik alpha cronbach yaitu sebesar 0,60. Jika nilai r -hitung $>$ dari 0,60 maka item tersebut dinyatakan valid.

| No | Variabel | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | Standar Reliabilitas | Keterangan |
|----|-------------------------------|--|-------------------------|------------|
| 1. | Komunikasi (X1) | 0,719 | 0.60 | Reliabel |
| 2. | Sumber Daya (X2) | 0,748 | 0.60 | Reliabel |
| 3. | Disposisi (X3) | 0,862 | 0.60 | Reliabel |
| 4. | Struktur Birokrasi (X4) | 0,772 | 0.60 | Reliabel |
| 5. | Implementasi Kebijakan (Y) | 0,884 | 0.60 | Reliabel |

Sumber: Hasil Olah Data SPSS Versi 25 tahun 2022

berdasarkan data tabel di atas menunjukkan angka-angka dari nilai cronbachs Alpha (α) pada seluruh variabel dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran di atas nilai 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa pernyataan kuesioner responden menunjukkan kehandalan dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian.

3. Uji normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data tersebut

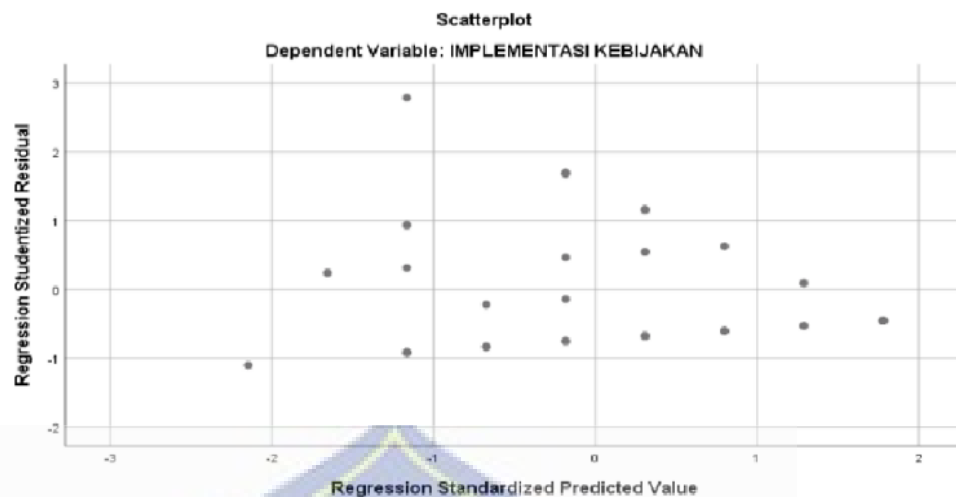
berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka artinya data yang dianalisis berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|
| | | Unstandardized Residual |
| N | | 69 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.2317464 |
| | | 1 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .072 |
| | Positive | .072 |
| | Negative | -.067 |
| Test Statistic | | .072 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

Berdasarkan tabel tersebut maka diketahui bahwa nilai $sig = 0,200 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa seluruh data yang digunakan saling berdistribusi normal, maka dapat dilakukan analisis data selanjutnya.

4. uji heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan homoskedastisitas. Adapun hasil analisis dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut:



Berdasarkan gambar grafik scatterplot dapat dilihat suatu model yang tidak beraturan atau tidak membentuk pola, terlihat titik-titik yang menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah. Hal ini dapat diindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas terhadap variabel-variabel independen yang telah diujikan.

5. uji multikoleniaritas.

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen), jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikoleniaritas. Untuk meneteksi adanya multikoleniaritas dapat dilihat dari nilai VIF (varian inflation factor) pedoman suatu model yang bebas multikoleniaritas yaitu nilai $VIF < 4$ atau 5 . Dari hasil analisis diperoleh nilai VIF untuk masing-masing variabel seperti pada tabel sebagai berikut.

| | | Coefficients ^a | | | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | | Tolerance | VIF |
| | | B | Std. Error | Beta | | | | |
| 1 | (Constant) | .935 | 1.795 | | .521 | .604 | | |
| | KOMUNIKASI | .332 | .088 | .299 | 3.781 | .000 | .649 | 1.542 |
| | SUMBER DAYA | .776 | .151 | .654 | 5.139 | .000 | .251 | 3.991 |
| | DISPOSISI | -.447 | .101 | -.420 | -4.409 | .000 | .447 | 2.240 |
| | STRUKTUR BIROKRASI | .350 | .115 | .293 | 3.040 | .003 | .437 | 2.289 |

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis pada tabel tersebut maka dapat diketahui nilai tolerance variabel *Current ratio* 1,000. Melihat nilai Tolerance lebih besar dari >0,10 maka artinya tidak terdapat Multikoleniaritas.

6. Uji Parsial (Uji T)

Uji dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. (t-test) hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05 Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sign > \alpha$
- H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sign < \alpha$

Bila terjadi penerimaan H_0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan, sedangkan bila H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh yang signifikan.

| Variabel | T Hitung | Sig |
|--------------------|----------|-------|
| Komunikasi | 7.246 | 0,000 |
| Sumber Daya | 8.896 | 0,000 |
| Disposisi | 2.977 | 0,004 |
| Struktur Birokrasi | 7.931 | 0,000 |

$$T_{\text{tabel}} = (0,05/2:n-k-1)$$

$$=(0,05/2:69-1-1)$$

$$=(0,025 : 67) \text{ Dilihat pada distribusi nilai } t_{\text{tabel}} = 1,996$$

Dari tabel di atas maka dapat disusun, di antaranya:

- Berdasarkan nilai signifikan : Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t hitung variabel komunikasi (x1) sebesar 7.246 $\geq t_{\text{tabel}} 1,996$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Komunikasi berpengaruh positif terhadap variabel Implementasi Kebijakan.
- Berdasarkan nilai signifikan: Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t hitung sumber daya (x2) sebesar 8.896 $\geq t_{\text{tabel}} 1,996$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sumber daya berpengaruh positif terhadap variabel Implementasi Kebijakan.
- Berdasarkan nilai signifikan : Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t hitung variabel disposisi (x3) sebesar 2.977 $\geq t_{\text{tabel}} 1,996$ dan nilai signifikan sebesar $0,004 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi berpengaruh positif terhadap variabel Implementasi Kebijakan.

- d. Berdasarkan nilai signifikan : Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t hitung variabel struktur birokrasi (x4) sebesar $7.931 \geq t$ tabel 1,996 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap variabel Implementasi Kebijakan.

7. Uji simultan (Uji F)

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 293.787 | 4 | 73.447 | 45.562 | .000 ^b |
| | Residual | 103.170 | 64 | 1.612 | | |
| | Total | 396.957 | 68 | | | |

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

b. Predictors: (Constant), STRUKTUR BIROKRASI, KOMUNIKASI, DISPOSISI, SUMBER DAYA

Nilai F hitung $> F$ tabel diperoleh $45.562 > 4.00$ artinya positif. Sementara nilai P-value diperoleh pada kolom sig $0,000 < 0,1$ artinya signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara simultan dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

8. Analisis regresi berganda.

| Model | | Coefficients ^a | | | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|-------------------------|-------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | | Tolerance | VIF |
| | | B | Std. Error | Beta | | | | |
| 1 | (Constant) | .935 | 1.795 | | .521 | .604 | | |
| | KOMUNIKASI | .332 | .088 | .299 | 3.781 | .000 | .649 | 1.542 |
| | SUMBER DAYA | .776 | .151 | .654 | 5.139 | .000 | .251 | 3.991 |
| | DISPOSISI | -.447 | .101 | -.420 | -4.409 | .000 | .447 | 2.240 |
| | STRUKTUR BIROKRASI | .350 | .115 | .293 | 3.040 | .003 | .437 | 2.289 |

a. Dependent Variable: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 0,935 + 0,735 (X_1) + 0,873 (X_2) + 0,313 (X_3) + 0,830 (X_4)$$

Keterangan:

Y = Variabel terkait (Implementasi Kebijakan)

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃, b₄ = Koefisien Regresi

X₁ = Variabel bebas (Komunikasi)

X₂ = Variabel bebas (Sumber Daya)

X₃ = Variabel Bebas (Disposisi)

X₄ = Variabel Bebas (Struktur Birokrasi)

e = Standar error

a. Koefisien sebesar 0,935 mengandung arti bahwa nilai konsisten variable Implementasi Kebijakan adalah 0,935

b. Koefisien regresi X₁ sebesar 0,735 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 % nilai peningkatan

Komunikasi, maka nilai implementasi Kebijakan bertambah sebesar 0,735.

c. Koefisien regresi X2 sebesar 0,873 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 %/c nilai peningkatan Sumber Daya maka nilai Implementasi Kebijakan bertambah sebesar 0,873

d. Koefisien regresi X3 sebesar 0,363 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 %/c nilai peningkatan Disposisi, maka nilai Implementasi Kebijakan bertambah sebesar 0,363.

e. Koefisien regresi X4 sebesar 0,830 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 %/c nilai peningkatan Struktur Birokrasi, maka nilai Implementasi Kebijakan bertambah sebesar 0,830.

9. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Adapun hasil analisis data dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Model summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .860 ^a | .740 | .724 | 1.270 |
| a. Predictors: (Constant), STRUKTUR BIROKRASI, KOMUNIKASI, DISPOSISI, SUMBER DAYA | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa nilai

(R) yaitu 0,860 Untuk mengetahui besarnya variasi dari yang diperoleh koefisien determinasi R^2 sebesar 0,740 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh besaran Komunikasi, Sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi berpengaruh Terhadap Implementasi kebijakan adalah sebesar 74%. Sisanya terdapat 26% faktor-faktor lain yang mempengaruhi yang belum diketahui.

b. Hasil pengujian hipotesis.

1. Variabel komunikasi (x_1)

Pengaruh komunikasi terhadap Implementasi Kebijakan industrialisasi secara simultan. Hasil uji regresi pada variabel komunikasi terhadap implementasi kebijakan tersebut terdapat pengaruh atau signifikansi. Berdasarkan nilai signifikan: dari tabel Coefficients diperoleh nilai T_{hitung} Variabel Aktinabilitas (x_1) sebesar $7.246 \geq T_{tabel} 1,996$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Komunikasi berpengaruh positif terhadap variabel Implementasi Kebijakan.

2. Variable sumber daya (x_2)

Pengaruh sumber daya terhadap Implementasi Kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara simultan. Hasil uji regresi pada variabel sumber daya terhadap implementasi kebijakan tersebut terdapat pengaruh atau signifikansi. Berdasarkan nilai signifikan: Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t_{hitung} Variabel Transparansi (x_2)

sebesar 8.896 1,996 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sumber daya berpengaruh positif terhadap variabel Implementasi Kebijakan.

3. Variable disposisi (x3)

Pengaruh disposisi terhadap implementasi Kebijakan industrialisasi berbasis pertanian secara simultan. Hasil uji regresi pada variabel sumber daya terhadap implementasi kebijakan terdapat pengaruh atau signifikansi. Berdasarkan nilai signifikan: Dari tabel Coefficient t s diperoleh nilai T hitung Variabel Partisipasi (X3) sebesar 2.977. 1,996 dan nilai signifikan sebesar $0,004 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi berpengaruh positif terhadap variabel Implementasi Kebijakan.

4. Variabel Struktur birokrasi (x4)

Pengaruh struktur birokrasi terhadap Implementasi Kebijakan Industrialisasi berbasis peertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat secara simultan. Hasil uji regresi pada variabel sumber daya terhadap implementasi Industrialisasi berbasis peertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat terdapat pengaruh atau signifikansi. Berdasarkan nilai signifikan Dari tabel Coefficients diperoleh nilai t hitung Variabel Partisipasi (X3) sebesar $7.931 \geq T$ tabel 1,996 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak (menerima H_a) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel struktur birokrasi berpengaruh positif terhadap variabel Implementasi Kebijakan.

B. Pembahasan kuantitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh positif dan secara simultan terhadap implementasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan persamaan regresi linier berganda adalah $Y = 0,935 + 0,735X_1 + 0,873X_2 + 0,363X_3 + 0,830X_4$. Hal ini sesuai dengan teori yang dijadikan rujukan dari Edward III bahwa dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan program implementasi kebijakan terdapat variabel penentu terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Pebriyanti et al., 2021). Temuan ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Misroji, 2014) yang dimana dari keempat variabel tersebut, variabel disposisi tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini berbeda dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan Dengan demikian dari keempat variabel tersebut, variabel komunikasi di dalam korelasinya memberikan pengaruh pada tingkat signifikan taraf yang kuat terhadap variabel implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian. Karena jika variabel komunikasi mengalami kenaikan sebesar satu persen, korelasiterhadap kenaikan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik sebesar 0,735 persen baik secara partial maupun simultan.

Hasil uji koefisien determinasi diketahui besarnya variasi dari yang diperoleh koefisien determinasi R Square sebesar 0,740 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh besaran Komunikasi, Sumberdaya, disposisi dan Struktur Birokrasi berpengaruh Terhadap Implementasi kebijakan adalah sebesar 74 %. Sisanya terdapat 26 % faktor- faktor lain yang mempengaruhi yang belum diketahui.

Hasil analisis Uji t dengan menggunakan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$; maka diketahui nilai t tabel sebesar 1,996. Diketahui nilai T hitung, variabel komunikasi (X1) sebesar 7.246, implementasi kebijakan variabel komunikasi (X1) berpengaruh positif dan secara simultan terhadap implementasi kebijakan. Hasil uji regresi pada variabel komunikasi kinerja pegawai terdapat pengaruh atau signifikansi. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan Seiler & Westet.al, (2010) jadi komunikasi adalah proses berbagi dan menciptakan makna secara simultan melalui interaksi simbolik manusia. Komunikasi merupakan proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka (Wijaya, 2014). Sebagai sebuah proses, komunikasi bersifat berkesinambungan, dinamis dan kompleks. Proses penciptaan dan penginterpretasian makna berlangsung terus menerus. Dalam proses tersebut, komunikasi menjadi hal penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif. Dengan adanya komunikasi yang baik antar sumber daya manusia, rasa saling percaya akan terbangun seiring waktu, hal ini menjadi bentuk positif komunikasi bagi sebuah organisasi.

Diketahui nilai t hitung, variabel sumber daya (X2) sebesar 8.896, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan variabel sumber daya (X2) berpengaruh positif dan secara simultan terhadap implementasi kebijakan. Hasil uji regresi pada variabel komunikasi kinerja pegawai terdapat pengaruh atau signifikansi. Sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam menentukan kualitas individu, kelompok, maupun di suatu organisasi. Keberhasilan suatu daerah ditentukan oleh kemampuan manusia yang dapat mengelola daerah dengan baik (Oktarina, A., 2017). Untuk dapat mewujudkannya, pengelolaan manajemen sumber daya manusia sangat diperlukan dan harus

berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia adalah proses pengelolaan dalam memberdayakan sumber daya manusia sesuai dengan bakat yang dimiliki dan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Proses manajemen sumber daya manusia, dapat dimulai dari perencanaan sumber daya manusia, analisis jabatan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, pengukuran kinerja, pemeliharaan sumber daya manusia, penilaian kinerja, dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Diketahui nilai T hitung, variabel disposisi (X3) sebesar 2.977, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan variabel disposisi (X3) berpengaruh positif dan secara simultan terhadap implementasi kebijakan. Hasil uji regresi pada variabel komunikasi kinerja pegawai terdapat pengaruh atau signifikansi. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan (Subekti et al., 2017). Dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementor sangat menentukan efektivitas implementasi kebijakan dalam mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Sikap atau disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kognisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, dan intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Diketahui nilai T hitung variabel struktur birokrasi (X4) sebesar 7.931. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan variabel struktur birokrasi (X4) berpengaruh positif dan secara simultan terhadap implementasi kebijakan. Hasil uji regresi pada variabel komunikasi terdapat pengaruh atau signifikansi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan

kewenangan yang di embannya (Sobari,2020).Fungsi dari struktur birokrasi sendiri adalah menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung sebagaimana seharusnya. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih pelaksanaantugas.Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai thitung > nilai T ,tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi (X 1), sumber daya (X2), disposisi (X3), dan struktur birokrasi (X4) secara partial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan penyebaran informasi publik(Y),sehingga hipotesis dari keempat diterima.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner dan mewawancarai beberapa informan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu Industri prioritas NTB adalah industri pertanian, dimana pada tahun 2020 lalu telah menorehkan sejumlah capaian, meski baru dalam proses peletakan pondasi. Dari data yang ada, sejumlah capaian industri tersebut dimulai dari kegiatan standarisasi, dan sertifikasi olahan pangan lokal (halal, merek, BPOM, dan uji laboratorium produk lainnya.) juga ada bimtek dan pendampingan terhadap peningkatan produksi disektor pertanian untuk industrialisasi.
2. Empat faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi, berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel komunikasi (X1), sumber daya (X2), disposisi (X3), dan struktur birokrasi (X4),

terhadap implementasi (Y), kebijakan industrialisasi berbasis pertanian.

3. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipengaruhi secara signifikan oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di antara faktor-faktor tersebut, komunikasi muncul sebagai penentu paling dominan, yang menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang efektif serta koordinasi di antara para aktor kebijakan. Sumber daya dan struktur birokrasi juga memberikan dukungan kuat terhadap implementasi, sementara disposisi pelaksana berkontribusi pada konsistensi dan keberlanjutan eksekusi kebijakan.
4. Temuan ini menyoroti keunikan penelitian dibandingkan studi sebelumnya. Jika penelitian terdahulu cenderung berfokus pada satu variabel kebijakan atau konteks industrialisasi yang lebih luas, riset ini memberikan analisis komprehensif dengan mengintegrasikan empat dimensi implementasi kebijakan Edward III dalam kerangka khusus industrialisasi berbasis pertanian. Kebaruan penelitian ini terletak pada bukti empiris dari Provinsi NTB, di mana potensi pertanian tinggi tetapi pengembangan industrinya masih terbatas. Kombinasi antara konteks dan kerangka analitis ini menawarkan wawasan baru tentang

bagaimana implementasi kebijakan dapat secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah agraris.

5. Dari perspektif kebijakan, temuan ini mengimplikasikan bahwa industrialisasi berbasis pertanian dapat menjadi jalur strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung oleh strategi komunikasi yang kuat, sumber daya yang memadai, birokrasi yang berkomitmen, serta disposisi positif dari para pelaksana. Bagi pemerintah daerah, hal ini berarti perlu memprioritaskan koordinasi antar lembaga, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menyederhanakan proses birokrasi, dan memastikan bahwa para pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tujuan kebijakan. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian ini dengan memasukkan variabel tambahan, seperti partisipasi masyarakat dan dinamika pasar eksternal, guna memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang keberhasilan kebijakan.
6. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa efektivitas implementasi kebijakan industrialisasi berbasis pertanian tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh mekanisme administratif, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat, praktik tradisional, serta kemampuan adaptasi kelembagaan lokal. Mengintegrasikan

dimensi-dimensi ini ke dalam kerangka kebijakan dapat membantu menjembatani kesenjangan antara arahan top-down dan kebutuhan bottom-up.

7. Lebih jauh, bukti yang disajikan dalam penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi diskursus pembangunan daerah berkelanjutan. Dengan menyoroti NTB sebagai studi kasus, hasil penelitian menegaskan bahwa daerah dengan basis pertanian yang kuat dapat memanfaatkan industrialisasi bukan untuk menggantikan pertanian, melainkan untuk memperkuat rantai nilai, meningkatkan daya saing produk, dan membuka akses ke pasar yang lebih luas. Perspektif ini sejalan dengan tujuan pembangunan global yang menekankan inklusivitas, keberlanjutan, dan pemberdayaan lokal sebagai pilar utama transformasi ekonomi.
8. penelitian ini memperkuat pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dalam implementasi kebijakan. Industrialisasi berbasis pertanian bukanlah upaya sekali jalan, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi sosial-ekonomi, inovasi teknologi, dan tren pasar global. Dengan membangun mekanisme pemantauan yang kokoh, kebijakan akan tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang di NTB maupun di wilayah agraris serupa.

B. Saran.

Terkait dengan hubungan saran yang penulis dapat berikan masukan terkait program tersebut, oleh pemerintah provinsi nusa tenggara barat, khususnya dinas perindustrian dan dinas pertanian dalam upaya penerapan kebijakan industrialisasi berbasis pertanian, pemerintah harus memfasilitasi semua kegiatan terkait penguatan 5 faktor yang pendukung menciptakan nilai tambah di antaranya: 1). Menyediakan lingkungan yang kondusif. 2). SDM yang handal 3). Infrastruktur yang memadai, 4). Faktor pendukung lainnya, 5). Proses industrialisasi (methode, dana, sumber daya manusia, mesin, material.)



DAFTAR PUSTAKA

- Adryamarthanino, V. (2021). *Revolusi Industri: Latar Belakang, Jenis Industri, dan Dampak*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/05/02/122323079/revolusi-industri-latar-belakang-jenis-industri-dan-dampak?page=all>
- Amira, A. (2019). Perbandingan Pengaturan Status Penanaman Modal Perseroan Terbuka dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing juncto Undang-Undang No 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penan. *Jurnal Legal Reasoning*, 2(1), 1–15.
- Andrianus, F., & Yunekha, G. (2020). Analisis Kesejahteraan Driver Go-Jek di Kota Padang (Pendekatan Objektif dan Subjektif). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v21i1.1498>
- Ardika, I. W., & Budhiasa, G. S. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. *Piramida*, 13(2), 87–96.
- Ardiratna, K., Astuti, A., & Sudrajat, I. S. (2018). Pengaruh Luas Lahan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Padi di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. *Jurnal Ilmiah Agritas*, 1(2), 1–8.
- Aripin, S., & Daud, M. (2014). Peran Administrator Publik dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan Analisis. *JURNAL ACADEMICA Fisip Untad*, 06(01), 1158–1169.
- Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Iqtishaduna*, 12(1), 29–47. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283>
- Ayuningtias, T., & Murdianto, M. (2017). Dampak Industrialisasi Pedesaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.29244/jskpm.1.2.143-156>
- Brier, J., & lia dwi jayanti. (2020). *Implementasi Kebijakan Pendidikan*. 30(2), 1–25. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Budiana, I-N & Damayanti, A., S. (2022). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022*. <https://ntb.bps.go.id/publication/2022/11/30/03108e98ed228cccd3517b33/indikator-kesejahteraan-rakyat-provinsi-nusa-tenggara-barat-2022.html>
- Damayanthi, V. R. (2008). Proses Industrialisasi Di Indonesia Dalam Prespektif Ekonomi Politik. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(Mei), 68–89.
- Destindira, S., & Nasdian, F. T. (2018). Hubungan Industrialisasi Pedesaan dengan Tingkat Resiliensi Rumah Tangga Petani. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(6), 745–758. <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.6.745-758>

- Donna NP Butarbutar, Lelo Sintani, & Luluk Tri Harinie. (2020). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Pemberdayaan Perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31–39. <https://doi.org/10.37304/jem.v1i1.1203>
- Ekel, A. F. (2020). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata Di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92). file:///C:/Users/abdul/Downloads/jm_jap,+Jurnal+AGNES+FIRANTI+EKEL.pdf
- Fajariah, M., & Suryo, D. (2020). Sejarah Revolusi Industri di Inggris Pada Tahun 1760-1830. *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 8(1), 77. <https://doi.org/10.24127/hj.v8i1.2214>
- Gunawan, & Winarno, E. (2017). Refleksi terhadap wacana proses kebijakan berbasis riset. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, N, 157–178.
- Guntur, M. (2021). Konsep Dasar Analisis Data Kualitatif. In *Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*.
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 1–14.
- Hannan, A. (2018). Strategi Penguatan Pembangunan Madura Yang Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Nilai Kearifan Lokal. *Simulacra: Jurnal Sosiologi*, 1(1), 19–42. <https://doi.org/10.21107/sml.v1i1.4982>
- Hendrastomo, G. (2011). Keterpurukan Sektor Pertanian Sebagai Potret Kegagalan Industrialisasi Di Indonesia. *Dimensia*, 5(1), 71–83. <http://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3441>
- Heryani, H., Legowo, A., Nugroho, I. (2020). Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Inovasi. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 30(3), 290–298. <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2020.30.3.290>
- Hidayat, I. H. R., & MT, I. P. M. (2021). *PERAN KEILMUAN MANAJEMEN INDUSTRI PADA ERA REVOLUSI INDUSTRY 4.0 DAN SOCIETY 5.0*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Imamudin, & N. H. (2018). Analisis Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Kalimantan. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 2(2), 1–11.
- Indahsari, K. (2016). *KONSEPSI INDUSTRIALISASI MADURA BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL*. <http://ardhianzahroni.multiply.com/journal/item/1>
- Indonesia, R. (1984). Undang Undang No . 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian. In *Undang Undang No . 5 Tahun 1984 Tentang : Perindustrian* (Issue 5). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1984/5TAHUN~1984UU.htm>
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.”. *Jakarta, RI*.
- Irwan, M. (2017). Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Penanganannya Dalam Ekonomi Islam. *EKONOBIS*, 3(2), 1–25.

<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

- Ismail, E., & Mohd noor, A. (2019). PERKEMBANGAN INDUSTRI PERTANIAN DI SARAWAK, 1970-1981 DEVELOPMENT OF AGRICULTURE INDUSTRY IN SARAWAK, 1970-1981. *Journal of History Department*, 6(1), 5–10.
- Kharisma, A. C. (2018). *Pengaruh industrialisasi terhadap religiusitas dan spiritualitas masyarakat Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto*. 1–116. <http://digilib.uinsby.ac.id/23842/>
- Kilmanun, J. C., & Astuti, D. W. (2020). Potensi Dan Kendala Revolusi Industri 4.0. Di Sektor Pertanian. *Seminar Nasional Kesiapan Sumber Daya Pertanian Dan Inovasi Spesifik Lokasi Memasuki Era Industri 4.0*, 35–40. <https://www.wartaekonomi.co.id/read215598/begini-revolusi-industri-40-di-sektor->
- Machmud, F., Kimbal, M., & Rengkung, F. (2017). Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Matina, & Praza, R. (2018). ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN PETANI PADI SAWAH DI KABUPATEN ACEH UTARA. *Agrifo*, 3(2), 1–8. <https://ojs.unimal.ac.id/agrifo/article/view/1109>
- Maulia, I. (2020). Implementasi Sistem E-Toll Di Kota Makassar. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(2), 1–18. file:///C:/Users/abdul/Downloads/jm_jap,+JURNAL+HERTO+NGETJE.pdf
- Maunde, R., Posumah, J., & Kolondam, H. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 DI DESA KUMA SELATAN KECAMATAN ESSANG SELATAN KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *Jurnal Administrasi 2021 - Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 21(1), 1–8. [file:///C:/Users/abdul/Downloads/jm_jap,+jurnal+riski+maunde\(1\).pdf](file:///C:/Users/abdul/Downloads/jm_jap,+jurnal+riski+maunde(1).pdf)
- Mudatsir, R. (2021). Analisis Pendapatan Rumah Tangga Dan Tingkat Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah. *Journal TABARO Agriculture Science*, 5(1), 508. <https://doi.org/10.35914/tabaro.v5i1.760>
- Murwadi, T. (2018). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DALAM KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KARAWANG. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1), 1–27. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/2895/1754>
- Muryati, D. T., Heryanti, B. R., Astanti, D. I., Hukum, F., Semarang, U., & Nomor, P. (2016). PENGATURAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1), 23–38. <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/556/367>
- Ngetje, H. (2021). Implementasi Program Festival Wonderful Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(106), 1–11. file:///C:/Users/abdul/Downloads/jm_jap,+JURNAL+HERTO+NGETJE.pdf
- Ningsih, I. Y., & Arief, M. (2021). Bauran Promosi Pada Dealer Yamaha Tretan Motor Dengan

- Pendekatan Mixed Methods. *Jurnal Kajian Ilmu Manajemen (JKIM)*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.21107/jkim.v1i1.10591>
- Nurhayati, S. F., & Kusumawati, E. (2016). Identifikasi Sektor Unggulan Kabupaten Lamongan: Tahun 2006 2010. *Telaah Bisnis*, 14(1), 27–52. <https://doi.org/10.35917/tb.v14i1.13>
- Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2021). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 199–210. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.96>
- Paramita, C., & Puja Hapsari, M. (2021). Luas Panen dan Produksi Padi 2021. In *Badan Pusat Statistik Wonogiri*. BPS Nusa Tenggara Barat. <https://www.bps.go.id/indicator/55/61/1/produksi-tanaman-sayuran.html>
- Patta Rapanna, S. E., & Zulfikry Sukarno SE, M. M. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Sah Media.
- Primadianti, N., & Sugiyanto, C. (2020). Ketimpangan Regional, Pertumbuhan Ekonomi Pro Poor, Dan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.14710/jdep.3.1.1-20>
- Purnomo, R. A. (2016). *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*. Ziyad Visi Media.
- Risa, H., Badaruddin, B., & Tanjung, M. (2021). Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa dalam Mengatasi Kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading. *Perspektif*, 10(2), 739–753. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i2.5207>
- Rosni, R. (2017). Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), 53. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>
- Rusda, R., Karim, K., Sarri, C., & Bima, L. (2020). Sosialisasi Pemanfaatan Energi Surya Kepada Kelompok Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) dalam Rangka Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian di Kabupaten Paser. *Dedication : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 185–192. <https://doi.org/10.31537/dedication.v4i2.366>
- Sawitri, D., & Soepardi, I. F. (2014). Modal Sosial Petani dan Perkembangan Industri di Desa Sentra Pertanian Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(1), 17–37.
- Setiawan, H. H. (2019). Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (Iks) Di Indonesia. *Sosio Informa*, 5(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1786>
- Setyawantika, M. A., & Wiranto, T. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Jurnal Publika. *Jurnal Publika*, 5(1), 12–26.
- Sholihah, I. M., Syaparuddin, S., & Nurhayani, N. (2017). Analisis investasi sektor industri manufaktur, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i1.3930>

- Simatupang, P., & Syafa'at, N. (2016). Industrialisasi Berbasis Pertanian sebagai Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Nasional. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 18(1–2), 1. <https://doi.org/10.21082/fae.v18n1-2.2000.1-15>
- Siregar, N. A., & Ritonga, Z. (2019). Analisis Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Informatika*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.36987/informatika.v6i1.736>
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brillant.
- sukaesih kurniati, P. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI KOTA BANDUNG. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 4(2), 1–12. <https://core.ac.uk/download/pdf/267935126.pdf>
- Sutrisma, Fahrial, Zulhelmy, & Marliati. (2022). Analisis Pendapatan , Pengeluaran Rumah Tangga. *Jurnal Economica*, X(1).
- Trisyanti, U., & Prasetyo, B. (2018). Revolusi Industri dan Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Prosiding SEMATEKSOS 3 “Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0,”* 22–27. <http://iptek.its.ac.id/index.php/jps/article/view/4417>
- Wahyu Askar, M. (2015). Agricultural transformation, economic growth, and poverty in Indonesia. In *Media Wahyu Askar / JIAP* (Vol. 1).
- Wardhiani, W. F. (2019). Peran Politik Pertanian dalam Pembangunan Pertanian menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Sektor Pertanian. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 83–94.
- Witono, T. (2020). Pembangunan Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Pekerjaan Sosial. *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 16(2), 57–72. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Quantum/article/view/2901>
- Wiwit Pura, N., Saky, D, Malthuf, M, & Gazali, M. (2021). Penerapan Naive Bayes dalam Mengklasifikasikan Masyarakat Miskin di Desa Lepak. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 123–132. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3430>
- Yulianto, S., & Hidayatullah, K. H. (2014). Analisis Klaster Untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat. *Statistika*, 2(1), 1–8. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/statistik/article/view/1115>
- Yunus, N. R. (2018). Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 253–276. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.165>
- Zain, M. A., Yurista, A. P., & Yuniza, M. E. (2014). Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, 1(2), 63–76.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : M Arif Budiman

Nim : 105031100421

Program Studi : Magiter Administrasi Publik

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 3% | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 24% | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 9% | 15 % |
| 4 | Bab 4 | 10% | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 0% | 5 % |


Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Juli 2023

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Nursinah, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591